



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 109 TAHUN
2019 TENTANG KODE REKENING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:** a. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 maka Peraturan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 178 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat:** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG KODE REKENING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kode Rekening Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 109) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 September 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 89

**KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI
 KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KODE	URUSAN ORGANISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
101	Pendidikan	1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
102	Kesehatan	1.02.01	Dinas Kesehatan	
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.04.01	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	
105	Ketertamanan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	
106	Sosial	1.06.01	Dinas Sosial	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
201	Tenaga Kerja	2.01.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
202	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
203	Pangan	2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	
204	Pertanahan	2.04.01	Urusan Pertanahan (Sekretariat Daerah)	
205	Lingkungan Hidup	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	
206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
207	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.01	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	
209	Perhubungan	2.09.01	Dinas Perhubungan	
210	Komunikasi dan Informatika	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	
211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
212	Penanaman Modal	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
213	Kepemudaan dan Olah Raga	2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
214	Statistik	2.14.01	Urusan Statistik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	
215	Persandian	2.15.01	Urusan Persandian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	
216	Kebudayaan	2.16.01	Urusan Kebudayaan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	
217	Perpustakaan	2.17.01	Dinas Perpustakaan	
218	Kearifan	2.18.01	Urusan Kearifan (Dinas Perpustakaan)	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
301	Kelautan dan Perikanan	3.01.01	Dinas Perikanan dan Peternakan	
302	Pariwisata	3.02.01	Dinas Pariwisata	

1	2	3	4	5
303	Pertanian	3.03.01	Dinas Pertanian	
		3.03.02	Urusan Pertanian (Dinas Perikanan dan Peternakan)	
304	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.04.01	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)	
305	Perdagangan	3.05.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
306	Perindustrian	3.06.01	Urusan Perindustrian (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	
307	Transmigrasi	3.07.01	Urusan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)	
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	
401	Perencanaan	4.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
402	Keuangan	4.02.01	Badan Keuangan Daerah	
403	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	4.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
404	Penelitian dan Pengembangan	4.04.01	Urusan Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)	
405	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.05.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
406	Kesatuan Bangsa dan Politik	4.06.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	FUNGSI PENDUKUNG	5	FUNGSI PENDUKUNG	
501	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	5.01.01	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	
502	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.02.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
503	Sekretariat Daerah	5.03.01	Sekretariat Daerah	
504	Sekretariat DPRD	5.04.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
505	Inspektorat	5.05.01	Inspektorat	
506	Sekretariat KORPRI	5.06.01	Sekretariat KORPRI	
507	Kecamatan	5.07.01	Kecamatan Siak	
		5.07.02	Kecamatan Sungai Apit	
		5.07.03	Kecamatan Minas	
		5.07.04	Kecamatan Tualang	
		5.07.05	Kecamatan Dayun	
		5.07.06	Kecamatan Kerinci Kanan	
		5.07.07	Kecamatan Bunga Raya	
		5.07.08	Kecamatan Sungai Mandau	
		5.07.09	Kecamatan Kandia	
		5.07.10	Kecamatan Koto Gasib	
		5.07.11	Kecamatan Lubuk Dalam	
		5.07.12	Kecamatan Sabak Auh	
		5.07.13	Kecamatan Mempura	
		5.07.14	Kecamatan Pusako	


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : September 2020

**SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Aset	
2	Kewajiban	
3	Ekuitas Dana	
4	Pendapatan	
5	Belanja	
6	Pembiayaan	

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : September 2020

**KODE DAN KLASIFIKASI FUNGSI
KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
01	Pelayanan Umum	
02	Pertanahan *)	
03	Ketertiban dan Ketentraman	
04	Ekonomi	
05	Lingkungan Hidup	
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	
07	Kesehatan	
08	Pariwisata dan Budaya	
09	Agama *)	
10	Pendidikan	
11	Perlindungan Sosial	

Keterangan :

*) *Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah*

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

**KODE DAN DAFTAR PROGRAM KEGIATAN
 MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1			2	3
			PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD	
X XX	XX	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
X XX	XX	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	
X XX	XX	01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	
X XX	XX	01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
X XX	XX	01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	
X XX	XX	01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	
X XX	XX	01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
X XX	XX	01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	
X XX	XX	01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	
X XX	XX	01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
X XX	XX	01.10	Penyediaan alat tulis kantor	
X XX	XX	01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
X XX	XX	01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
X XX	XX	01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
X XX	XX	01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	
X XX	XX	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
X XX	XX	01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	
X XX	XX	01.17	Penyediaan makanan dan minuman	
X XX	XX	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
X XX	XX	01.19	Penyediaan jasa keamanan kantor	
X XX	XX	01.20	Penyediaan jasa administrasi kantor	
X XX	XX	01.21	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	
X XX	XX	01.22	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	
X XX	XX	01.23	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	
X XX	XX	01.24	Penyediaan jasa administrasi kantor teknis pertanahan	
X XX	XX	01.25	Penataan dan Pengelolaan Arsip Satuan Kerja Perangkat Daerah	
X XX	XX	01.26	Penyelenggaraan pelayanan UPTD Labkesda Kabupaten Siak	
X XX	XX	01.27	Penyelenggaraan pelayanan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Siak	
X XX	XX	01.28	Penyelenggaraan Pelayanan Instalasi Pemerintah Wajib Laport	
X XX	XX	01.29	Penyelenggaraan Pelayanan RSUD Type D	
X XX	XX	01.30	Intensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	
X XX	XX	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
X XX	XX	02.01	Pembangunan rumah jabatan	
X XX	XX	02.02	Pembangunan rumah dinas	
X XX	XX	02.03	Pembangunan gedung kantor	
X XX	XX	02.04	Pengadaan mobil jabatan	
X XX	XX	02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	
X XX	XX	02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	
X XX	XX	02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	
X XX	XX	02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	
X XX	XX	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	
X XX	XX	02.10	Pengadaan mebeleur	
X XX	XX	02.11	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor Mapolres Kab. Siak	
X XX	XX	02.12	Pembangunan Kantor Lurah	
X XX	XX	02.13	Penyusunan Dokumen AMDAL Makodim Kabupaten Siak	
X XX	XX	02.14	Pengembangan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Siak	
X XX	XX	02.15	Pembangunan Gedung Arsip	
X XX	XX	02.16	Landscape Balairung (Pendopo) Perumahan Jabatan	
X XX	XX	02.17	Pembangunan Air Mancur Kawasan Lapangan Maharatu Center	
X XX	XX	02.18	Pembangunan Tempat Parkir, Taman (landscape) Pengembangan Eks. Gedung Balai Tenun	
X XX	XX	02.19	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	
X XX	XX	02.20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Dinas Jabatan Bupati Siak	
X XX	XX	02.21	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	
X XX	XX	02.22	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana PLTD pemda Kab.Siak	

1			2	3
X XX	XX	02.23	Pemeliharaan/relokasi dan optimalisasi jaringan listrik dan kelengkapannya di Kab. Siak	
X XX	XX	02.24	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Siak Televisi (Siak TV)	
X XX	XX	02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Siak	
X XX	XX	02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi TV Relay Swasta Nasional Siak	
X XX	XX	02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi Siak TV	
X XX	XX	02.28	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	
X XX	XX	02.29	Penyusunan UKL/UPL	
X XX	XX	02.30	Pembangunan Lapangan Upacara Kantor Camat Sungai Apit	
X XX	XX	02.31	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Tualang	
X XX	XX	02.32	Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi	
X XX	XX	02.33	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Kerinci Kanan	
X XX	XX	02.34	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Siak	
X XX	XX	02.35	Pengadaan peralatan pembangkit listrik dan kelengkapannya	
X XX	XX	02.36	Pengadaan instalasi udara	
X XX	XX	02.37	Pengadaan Sarana Publikasi	
X XX	XX	02.38	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan	
X XX	XX	02.39	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	
X XX	XX	02.40	Pengadaan peralatan Satuan Pemadam Kebakaran	
X XX	XX	02.41	Pengadaan Peralatan Satuan Pengamanan	
X XX	XX	02.42	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	
X XX	XX	02.43	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	
X XX	XX	02.44	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
X XX	XX	02.45	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	
X XX	XX	02.46	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
X XX	XX	02.47	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	
X XX	XX	02.48	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	
X XX	XX	02.49	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	
X XX	XX	02.50	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	
X XX	XX	02.51	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	
X XX	XX	02.52	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	
X XX	XX	02.53	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi	
X XX	XX	02.54	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	
X XX	XX	02.55	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	
X XX	XX	02.56	Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor	
X XX	XX	02.57	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan khusus lapangan	
X XX	XX	02.58	Pemeliharaan rutin/berkala sound system	
X XX	XX	02.59	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan air minum	
X XX	XX	02.60	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik	
X XX	XX	02.61	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	
X XX	XX	02.62	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	
X XX	XX	02.63	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	
X XX	XX	02.64	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	
X XX	XX	02.65	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	
X XX	XX	02.66	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	
X XX	XX	02.67	Pembangunan Gedung Kantor Kepala Desa	
X XX	XX	02.68	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	
X XX	XX	02.69	Penyusunan DED	
X XX	XX	02.70	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Gedung Peninggalan Bersejarah	
X XX	XX	02.71	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Istana Sultan Siak	
X XX	XX	02.72	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Masjid Bersejarah	
X XX	XX	02.73	Pembangunan Gedung / Gudang Barang	
X XX	XX	02.74	Pembangunan Gedung Pertemuan Serba Guna Pemerintah Kabupaten Siak	
X XX	XX	02.75	Penyusunan LPPD Kab.Siak	
X XX	XX	02.76	Pengadaan kendaraan Khusus / Lainnya	
X XX	XX	02.77	Pembuatan Pagar Workshop	
X XX	XX	02.78	Pengadaan Sarana dan Prasarana E-KTP	
X XX	XX	02.79	DED (Detail Engineering Design) Gedung Kantor Desa	
X XX	XX	02.80	Penyusunan DED Rumah Dinas Jabatan Camat Siak	
X XX	XX	02.81	Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (SIPATEN)	
X XX	XX	02.82	Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten Siak	
X XX	XX	02.83	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sekolah Keagamaan	
X XX	XX	02.84	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan	
X XX	XX	02.86	Penyusunan DED Fasilitas Perkantoran	
X XX	XX	02.87	Perencanaan Teknis Semenisasi Kab. Siak	
X XX	XX	02.88	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Lanscape	
X XX	XX	02.89	Pembangunan Gedung Kesenian Kab. Siak	
X XX	XX	02.90	Pengembangan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Siak	

1		2		3
X XX	XX	02.91	Bimbingan Teknis Analisa Jabatan, ABK dan Evaluasi Jabatan	
X XX	XX	02.92	Pembangunan Sekolah Keagamaan	
X XX	XX	02.93	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan	
X XX	XX	02.94	Pembangunan Pasar Seni	
X XX	XX	02.95	DED (Detail Engenering Design) Pembangunan Gedung/Ruang	
X XX	XX	02.96	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	
X XX	XX	02.97	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	
X XX	XX	02.98	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	
X XX	XX	02.99	Pembangunan Gedung Kantor Koramil	
X XX	XX	2.100	Pembangunan Rumah Dinas di Wilayah Kecamatan	
X XX	XX	2.101	Rehab Gedung Kantor KUA	
X XX	XX	2.102	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Minas	
X XX	XX	2.103	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Dayun	
X XX	XX	2.104	Pembangunan Sekolah Keagamaan Kecamatan Kandis	
X XX	XX	2.105	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Pusako	
X XX	XX	2.106	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Siak	
X XX	XX	2.107	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Tualang	
X XX	XX	2.108	Pembangunan Gedung Diklat BKD	
X XX	XX	2.109	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
X XX	XX	2.110	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Kesehatan Daerah	
X XX	XX	2.111	Pembangunan Lanscape dan Pagar Instalasi Farmasi Kabupaten	
X XX	XX	2.112	Pekerjaan Interior Kantor	
X XX	XX	2.113	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Publikasi	
X XX	XX	2.114	Pembangunan Gedung Kwarcab Pramuka	
X XX	XX	2.115	Pembangunan Gedung Kesenian Kab. Siak	
X XX	XX	2.116	Land Clearing Lahan Pemerintah Kab. Siak	
X XX	XX	2.117	Pembangunan Sarana Perkantoran Pemerintah Daerah	
X XX	XX	2.118	Pemeliharaan rutin/berkala dalam dan luar istana siak	
X XX	XX	2.119	Pemeliharaan rutin/berkala dalam dan luar masjid bersejarah	
X XX	XX	2.120	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	
X XX	XX	2.121	Timbunan di Wilayah Kecamatan	
X XX	XX	02.122	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Informasi Pajak Daerah	
X XX	XX	02.123	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana BLK	
X XX	XX	02.124	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	
X XX	XX	02.125	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Balai Penyuluh KB	
X XX	XX	02.126	Review DED (Detail Engenering Design) Pembangunan Gedung/Ruang	
X XX	XX	02.127	Landscape Kantor Dinas	Perubahan
X XX	XX	02.128	Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah	Perubahan
X XX	XX	02.129	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	Perubahan
X XX	XX	02.130	Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD PU Kecamatan	Perubahan
X XX	XX	02.131	Pemeliharaan sedang/berat kendaraan Dinas / Operasional	Perubahan
X XX	XX	02.132	Pembuatan Sistem kearsipan berbasis online	Perubahan
X XX	XX	02.133	Pembuatan Sistem Tata Naskah Dinas Online (e-office)	Perubahan
X XX	XX	02.134	Invetarisasi Aset/Barang Milik Daerah	Perubahan
X XX	XX	02.135	Pengadaan Kontruksi / Pembelian Bangunan	Perubahan
X XX	XX	02.136	Operasional Penanganan Covid19	Perubahan
X XX	XX	02.137	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19	Perubahan
X XX	XX	03	Program peningkatan disiplin aparatur	
X XX	XX	03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	
X XX	XX	03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
X XX	XX	03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	
X XX	XX	03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	
X XX	XX	03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	
X XX	XX	03.06	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	
X XX	XX	03.07	Penyediaan jasa kesehatan jasmani/rohani pegawai	
X XX	XX	03.08	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Jabatan	
X XX	XX	03.09	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	
X XX	XX	03.10	Penyelenggaraan SKJ Pegawai di Lingkungan Kab. Siak	
X XX	XX	03.11	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	
X XX	XX	03.12	Pengadaan Pakaian Olahraga	
X XX	XX	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
X XX	XX	05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	
X XX	XX	05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	
X XX	XX	05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
X XX	XX	05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	
X XX	XX	05.05	Kegiatan penelitian mandiri (Fungsional)	
X XX	XX	05.06	Bimbingan teknis dan Diklat teknis fungsional aparatur SKPD	
X XX	XX	05.07	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	
X XX	XX	05.08	Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas	
X XX	XX	05.09	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas	
X XX	XX	05.10	Bimbingan Teknis Analisis Jabatan	

1		2		3
X XX	XX	05.11	Pelatihan Pelayanan Terpadu bagi Kecamatan Se-Kab. Siak	
X XX	XX	05.12	Pelatihan Pemberdayaan Aparatur Kecamatan	
X XX	XX	05.13	Pembelajaran langsung pelayanan perizinan Kota Yogyakarta	
X XX	XX	05.14	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas	
X XX	XX	05.15	Konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi peraturan-peraturan dibidang pendidikan	
X XX	XX	05.16	Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan	
X XX	XX	05.17	Bimbingan teknis dan diklat teknis kearsipan	
X XX	XX	05.18	Sosialisasi / penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah kabupaten siak	
X XX	XX	05.19	Bimbingan teknis dan diklat teknis perpustakaan	
X XX	XX	05.20	Pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan	
X XX	XX	05.21	Bimbingan teknis pembekalan panitia rencana aksi nasional hak asasi manusia (HAM) Kabupaten Siak	
X XX	XX	05.22	Bimbingan teknis penanganan perkara perdata dan tata usaha negara (TUN)	
X XX	XX	05.23	Bimbingan teknis penyusunan dan perancangan MoU dan surat perjanjian	
X XX	XX	05.24	Bimbingan teknis penegakan Peraturan Daerah bagi Satpol PP Kabupaten Siak	
X XX	XX	05.25	Bimbingan teknis penegakan peraturan perundang-undangan bagi PPNS Kabupaten Siak	
X XX	XX	05.26	Bimbingan teknis sistem informasi hukum (Siskum) peraturan perundang - undangan	
X XX	XX	05.27	Bimbingan teknis pembekalan bagi aparatur pemerintah tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	
X XX	XX	05.28	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa	
X XX	XX	05.29	Bimbingan teknis pelayanan publik	
X XX	XX	05.30	Penyusunan analisa beban kerja	
X XX	XX	05.31	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah	
X XX	XX	05.32	Sosialisasi standar pelayanan minimal	
X XX	XX	05.33	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi SKPD	
X XX	XX	05.34	Pelatihan dan Pendidikan Data Base dan Implementasi Paten bagi Aparatur Kecamatan	
X XX	XX	05.35	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Kehutanan.	
X XX	XX	05.36	Bimbingan Manajemen Mutu ISO 9001	
X XX	XX	05.37	Pelatihan/Training Pembentukan Karakter dan Budaya Kerja	
X XX	XX	05.38	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah	
X XX	XX	05.39	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM IV)	
X XX	XX	05.40	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM III)	
X XX	XX	05.41	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	
X XX	XX	05.42	Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Publik dalam bidang kependudukan	
X XX	XX	05.43	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Tentang Pelayanan dan Pencatatan Sipil	
X XX	XX	05.44	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik tentang Peristiwa Kelahiran dan Pencatatan Sipil	
X XX	XX	05.45	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kapasitas Perangkat Daerah dalam rangka Reformasi Birokrasi	
X XX	XX	05.46	Sosialisasi revisi PP 41 tahun 2007 bagi perangkat daerah	
X XX	XX	05.47	Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
X XX	XX	05.48	Bimbingan teknis penilaian kinerja individu pegawai	
X XX	XX	05.49	Bimbingan Teknis Strategi Pelayanan Prima	
X XX	XX	05.50	Hari Ulang Tahun (HUT Satpol dan Linmas)	
X XX	XX	05.51	Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan	
X XX	XX	05.52	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	
X XX	XX	05.53	Bimbingan Teknis Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman	
X XX	XX	05.54	Bimbingan Teknis Aparatur Pertanian	
X XX	XX	05.55	Bimbingan Teknis Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian	
X XX	XX	05.56	Bimbingan Teknis Penerapan Teknologi Pertanian	
X XX	XX	05.57	Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Pertanian	
X XX	XX	05.58	Pengembangan Sumber Daya Pertanian	
X XX	XX	05.59	Pelatihan tentang Pengendalian Penyakit	
X XX	XX	05.60	Pelatihan Petugas Promosi dan Kesehatan Keluarga	
X XX	XX	05.61	Pelatihan Petugas Pelayanan Kesehatan	
X XX	XX	05.62	Pelatihan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	
X XX	XX	05.63	Reward Petugas Pelayanan	
X XX	XX	05.64	Pembinaan Kepada Lembaga Pelayanan Publik	
X XX	XX	05.65	Pelatihan dan pendidikan aparatur kecamatan	
X XX	XX	05.66	Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Elektronik	
X XX	XX	05.67	Sosialisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi	
X XX	XX	05.68	Sosialisasi Undang-undang ASN	
X XX	XX	05.69	Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP)	
X XX	XX	05.70	Bimbingan Teknis Penyusunan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	

1			2	3
X XX	XX	05.71	Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengelolaan Kegiatan untuk Tingkat Dasar	
X XX	XX	05.72	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa	
X XX	XX	05.73	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	
X XX	XX	05.74	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	
X XX	XX	05.75	Seminar Lokakarya	
X XX	XX	05.76	Standarisasi dan Sertifikasi Petugas Kesehatan	
X XX	XX	05.77	Pengelolaan Sistem LAPORISP4N	
X XX	XX	05.78	Peningkatan Sumber daya Aparatur Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	
X XX	XX	05.79	Pengembangan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN dan e-PATEN)	
X XX	XX	05.80	Penyusunan Personil Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten	
X XX	XX	05.81	Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan [DAK]	
X XX	XX	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
X XX	XX	06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	
X XX	XX	06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	
X XX	XX	06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	
X XX	XX	06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	
X XX	XX	06.05	Penyusunan Laporan LAKIP	
X XX	XX	06.06	Penyusunan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi	
X XX	XX	06.07	Penyusunan Renstra	
X XX	XX	06.08	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
X XX	XX	06.09	Monitoring dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
X XX	XX	06.10	Penyusunan pelaporan penagihan piutang daerah	
X XX	XX	06.11	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	
X XX	XX	06.12	Penyusunan laporan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	
X XX	XX	06.13	Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	
X XX	XX	06.14	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	
X XX	XX	06.15	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasioanal Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
101			Pendidikan	
101	XX	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
101	XX	15.01	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	
101	XX	15.02	Pembangunan Gedung Sekolah	
101	XX	15.03	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	
101	XX	15.04	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	
101	XX	15.05	Pengadaan mebeulair sekolah	
101	XX	15.06	Penyelenggaraan BOP PAUD (DAK)	
101	XX	16	Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	
101	XX	16.01	Pengembangan pendidikan anak usia dini	
101	XX	16.02	Pembinaan Paud Terpadu Pembina Holistik integratif	
101	XX	16.03	Penyelenggaraan akreditasi Paud	
101	XX	16.04	Peningkatan mutu pembelajaran Paud	
101	XX	17	Program Pendidikan Masyarakat	
101	XX	17.01	Penyelenggaraan Paket A setara SD	
101	XX	17.02	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	
101	XX	17.03	Penyelenggaraan Paket C setara SMA	
101	XX	17.04	Pemberian bantuan operasional pendidikan masyarakat	
101	XX	17.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	
101	XX	17.06	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan masyarakat	
101	XX	17.07	Pengembangan sertifikasi pendidikan masyarakat	
101	XX	17.08	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	
101	XX	17.09	Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa	
101	XX	17.10	Peningkatan sarana prasarana pendidikan masyarakat	
101	XX	18	Program Pendidikan Dasar	
101	XX	18.01	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Sekolah Dasar	
101	XX	18.02	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Sekolah Menengah Pertama	
101	XX	18.03	Pengadaan mebeulair Sekolah Dasar (SD Sederajat)	

1			2	3
101	XX	18.04	Pengadaan mebeulair Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)	
101	XX	18.05	Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD Sederajat)	
101	XX	18.06	Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Sederajat)	
101	XX	18.07	Peningkatan sarana prasarana pendidikan Sekolah Dasar (SD sederajat)	
101	XX	18.08	Peningkatan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP sederajat)	
101	XX	18.09	Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sekolah Dasar	
101	XX	18.10	Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sekolah Menengah Pertama	
101	XX	18.11	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Sekolah Dasar	
101	XX	18.12	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Sekolah Menengah Pertama	
101	XX	18.13	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	
101	XX	18.14	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) SMP	
101	XX	19	Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Dasar	
101	XX	19.01	Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SD/MI, dan Pemantauan UASBN SD/MI	
101	XX	19.02	Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pencetak LJK UNAS SMP/MTs, dan Pemantauan UN/US SMP/MTs	
101	XX	19.03	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan sekolah dasar	
101	XX	19.04	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan menengah pertama	
101	XX	19.05	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD	
101	XX	19.06	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP	
101	XX	19.07	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran SD dengan menggunakan teknologi informasi	
101	XX	19.08	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran SMP dengan menggunakan teknologi informasi	
101	XX	19.09	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD	
101	XX	19.10	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SMP	
101	XX	19.11	Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas VI SD Khusus Mata Pelajaran UASBN	
101	XX	19.12	Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas III SMP/MTs Khusus Mata Pelajaran UNAS	
101	XX	19.13	Pembinaan kelembagaan pendidikan inklusif Sekolah Dasar	
101	XX	19.14	Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan inklusif Sekolah Dasar	
101	XX	19.15	Pembinaan kelembagaan pendidikan inklusif Sekolah Menengah Pertama	
101	XX	19.16	Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan inklusif Sekolah Menengah Pertama	
101	XX	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
101	XX	20.01	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi Guru SD/MI	
101	XX	20.02	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bagi Guru SMP/MTs	
101	XX	20.03	Peningkatan Kompetensi pendidik PAUD melalui pelatihan tingkat dasar (biaya pendidik kelas)	
101	XX	20.04	Diklat Calon Pengawas (Cawas)	
101	XX	20.05	Pelatihan Penilaian Kinerja Guru	
101	XX	20.07	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik pendidikan inklusif	
101	XX	20.08	Dukungan kesejahteraan Tenaga Kependidikan	
101	XX	20.09	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	
101	XX	20.10	Penilaian Angka Kredit Guru	
101	XX	20.11	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	
101	XX	20.12	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	
101	XX	20.13	Pengembangan mutu dan kualitas progam pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	
101	XX	20.14	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	
101	XX	20.15	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	
101	XX	20.16	Magang tenaga pendidikan	
101	XX	20.17	Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah	
101	XX	20.18	Pembinaan OSN Guru	
101	XX	20.19	Peningkatan Kompetensi pendidik PAUD melalui pelatihan tingkat dasar (biaya pendidik kelas)	
101	XX	20.20	Pelatihan guru pendidikan Agama Islam untuk SD Sederajat dan SMP Sederajat	
101	XX	20.21	Peningkatan kompetensi pengawas fungsional pendidikan melalui pelatihan profesional kepengawasan dan laporan kinerja unit kerja	
101	XX	20.22	Bimbingan penulisan karya inovasi dan publikasi ilmiah	

1			2	3
101	XX	20.23	Pelatihan tematik bagi guru SD/MI	
101	XX	20.24	Pelatihan Guru CPNS (Induksi)	
101	XX	20.25	Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan	
101	XX	21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
101	XX	21.01	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	
101	XX	21.02	Updating Profil Pendidikan dan Kebudayaan	
101	XX	21.03	Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Siak	
101	XX	21.04	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	
101	XX	21.05	Penyusunan Draft Peraturan Bupati terkait Pendidikan dan kebudayaan	
101	XX	21.06	Bimbingan teknis penerapan TIK di tingkat sekolah	
101	XX	21.07	Penunjang dana BOS	
101	XX	21.08	Penyusunan Grand Design penyelenggaraan pendidikan inklusif	
101	XX	21.09	Penyusunan DED Sekolah	
101	XX	23	Program Pendidikan Karakter	
101	XX	23.01	Pembinaan pendidikan karakter	
101	XX	23.02	Peningkatan Sarana Prasarana Pramuka	
101	XX	23.03	Pertemuan pembina pramuka siaga, penggalang dan penegak (karang pamitran)	
101	XX	23.04	Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	
101	XX	23.05	Mahir Lanjutan Kepramukaan bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan	
101	XX	23.06	Pelatihan Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti	
101	XX	24	Program Pendidikan Menengah	
101	XX	24.02	Pengadaan buku - buku dan alat tulis siswa	
102			Kesehatan	
102	XX	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
102	XX	15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	
102	XX	15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	
102	XX	15.03	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	
102	XX	15.16	Penyelenggaraan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	
102	XX	16	Program Pembinaan upaya kesehatan	
102	XX	16.01	Peningkatan pelayanan kesehatan gigi masyarakat	
102	XX	16.02	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	
102	XX	16.03	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes	
102	XX	16.04	Peningkatan pelayanan kesehatan Rveral Sistem	
102	XX	16.05	Pelayanan kesehatan pada event-event resmi dan hari-hari besar	
102	XX	16.06	Penyelenggaraan Lokakarya Mini Puskesmas	
102	XX	16.07	Pelayanan dan pembinaan Fit for School	
102	XX	16.08	Pembinaan pelayanan kesehatan Batra	
102	XX	16.09	Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan	
102	XX	16.10	Pembinaan upaya kesehatan kerja	
102	XX	16.11	Pembinaan Pelayanan kesehatan usia lanjut	
102	XX	16.12	Pembinaan pelayanan kesehatan jiwa	
102	XX	16.13	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Siak	
102	XX	16.14	Pendampingan dan penilaian akreditasi Puskesmas	
102	XX	16.15	Akreditasi Rumah Sakit	
102	XX	16.17	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	
102	XX	16.18	Penyelenggaraan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	
102	XX	16.19	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	
102	XX	16.20	Akreditasi Lapkesda	
102	XX	17	Program Pengawasan obat dan makanan	
102	XX	17.01	Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	
102	XX	18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
102	XX	18.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	
102	XX	18.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	
102	XX	18.03	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Pengobatan Tradisional	
102	XX	19	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	
102	XX	19.01	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	
102	XX	19.02	Penanggulangan kurang energi protein (KEP); enemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang Vit. A dan kekurangan zat besi lainnya	
102	XX	19.03	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	

1			2	3
102	XX	19.04	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, dan Reproduksi	
102	XX	19.05	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	
102	XX	19.06	Peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah	
102	XX	19.07	Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Siak	
102	XX	20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
102	XX	20.01	Penyehatan lingkungan	
102	XX	20.02	Pembinaan dan pengembangan Kabupaten Sehat	
102	XX	20.03	Pengawasan dan pengendalian sarana air minum	
102	XX	20.04	Pengawasan dan pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU)	
102	XX	20.05	Pengawasan dan pemeriksaan tempat pengolahan makanan dan minuman	
102	XX	21	Program Pengendalian Penyakit	
102	XX	21.01	Peningkatan Imunisasi	
102	XX	21.02	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	
102	XX	21.03	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	
102	XX	21.04	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
102	XX	21.05	Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji	
102	XX	21.06	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	
102	XX	21.07	Penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS	
102	XX	21.08	Pemberantasan penyakit Tuberkulosis (TB)	
102	XX	21.09	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
102	XX	21.10	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok	
102	XX	22	Program Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
102	XX	22.01	Pembangunan Puskesmas	
102	XX	22.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	
102	XX	22.03	Rehabilitasi Puskesmas	
102	XX	22.04	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	
102	XX	22.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes	
102	XX	22.06	Pembangunan Puskesmas Pembantu	
102	XX	22.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	
102	XX	22.08	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes	
102	XX	22.09	Rehabilitasi Puskesmas	
102	XX	22.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Polindes dan Poskesdes	
102	XX	22.11	Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan	
102	XX	22.12	Kalibrasi alat-alat kesehatan	
102	XX	22.13	Pengadaan Meubeuleur Puskesmas dan Pustu	
102	XX	23	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah	
102	XX	23.01	Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Jamkesda)	
102	XX	23.03	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan	
102	XX	23.04	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Minas	
102	XX	23.05	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sungai Mandau	
102	XX	23.06	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kandis	
102	XX	23.07	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Siak	
102	XX	23.08	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Mempura	
102	XX	23.09	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Kerinci Kanan	
102	XX	23.10	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Perawang	
102	XX	23.11	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Tualang	
102	XX	23.12	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Dayun	
102	XX	23.13	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Lubuk Dalam	
102	XX	23.14	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Koto Gasib	
102	XX	23.15	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sungai Apit	
102	XX	23.16	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Bunga Raya	

1			2	3
102	XX	23.17	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Sabak Auh	
102	XX	23.18	Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Pusako	
102	XX	24	Program Pengadaan Peningkatan sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit	
102	XX	24.41	Penyusunan DED	
102	XX	24.42	Penyusunan UKL-UPL/Amdal	
102	XX	24.43	Pembangunan Rumah Sakit	
102	XX	24.44	Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	
102	XX	24.45	Pengadaan Meubeuleur Rumah Sakit	
102	XX	24.46	Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit	
102	XX	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
102	XX	26.01	Penyediaan Alat kesehatan Rumah Sakit	
102	XX	26.02	Peningkatan Prasarana Rumah Sakit	
102	XX	26.03	Peningkatan Sarana Rumah Sakit	
102	XX	26.04	Penyediaan Perbekalan Farmasi Rumah Sakit	
102	XX	26.05	Penyediaan Makan Minum Pasien Rumah Sakit	
102	XX	27	Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
102	XX	27.01	Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	
102	XX	27.02	Pemeliharaan Prasarana Rumah Sakit	
102	XX	27.03	Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	
102	XX	28	Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	
102	XX	28.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	
102	XX	28.02	Akreditasi Rumah Sakit	
102	XX	30	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	
102	XX	3.001	Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	
102	XX	3.002	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Minas	
102	XX	3.003	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Mandau	
102	XX	3.004	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Kandis	
102	XX	3.005	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Siak	
102	XX	3.006	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Mempura	
102	XX	3.007	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Kerinci Kanan	
102	XX	3.008	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Perawang	
102	XX	3.009	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Tualang	
102	XX	3.010	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Dayun	
102	XX	3.011	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Lubuk Dalam	
102	XX	3.012	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Koto Gasib	
102	XX	3.013	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Sungai Apit	
102	XX	3.014	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Bunga Raya	
102	XX	3.015	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Sabak Auh	
102	XX	3.016	Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BLUD) UPTD Puskesmas Pusako	
103			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
103	XX	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
103	XX	15.51	PENINGKATAN JALAN KECAMATAN DAYUN (DAK)	
103	XX	15.52	PENINGKATAN JALAN KECAMATAN KOTO GASIB (DAK)	
103	XX	15.53	PENINGKATAN JALAN KECAMATAN KANDIS (DAK)	
103	XX	15.54	Peningkatan Jalan Kecamatan Siak	
103	XX	15.55	Perencanaan Pembangunan Jalan	
103	XX	15.56	Perencanaan Pembangunan Jembatan	
103	XX	15.57	Peningkatan Jalan Kecamatan Kandis	
103	XX	15.58	Peningkatan Jalan Kecamatan Mempura	

1			2	3
103	XX	15.59	Peningkatan Jalan Kecamatan Pusako	
103	XX	15.60	Peningkatan Jalan Kecamatan Sungai Apit	
103	XX	15.61	Peningkatan Jalan Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	15.62	Peningkatan Jalan Kecamatan Kerinci Kanan	
103	XX	15.63	Peningkatan Jalan Kecamatan Tualang	
103	XX	15.64	Peningkatan Jalan Kecamatan Minas	
103	XX	15.65	Peningkatan Jalan Kecamatan Sungai Mandau	
103	XX	15.66	Pembangunan Jembatan Kecamatan Siak	
103	XX	15.67	Pembangunan Jembatan Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	15.68	Pembangunan Jembatan Kecamatan Kerinci Kanan	
103	XX	15.69	Peningkatan Jalan Kecamatan Bunga Raya	
103	XX	15.70	Peningkatan Jalan Kecamatan Dayun	
103	XX	15.71	Peningkatan Jalan Kecamatan koto gasib	
103	XX	15.72	Peningkatan jalan kecamatan lubuk dalam	
103	XX	15.73	Pembangunan Jembatan Kecamatan mempura	
103	XX	15.74	Pembangunan Jembatan Kecamatan pusako	
103	XX	15.75	Pembangunan Jembatan Kecamatan sungai apit	
103	XX	15.76	Pembangunan Jembatan Kecamatan bunga raya	
103	XX	15.77	Pembangunan Jembatan Kecamatan dayun	
103	XX	15.78	Pembangunan Jembatan Kecamatan koto gasib	
103	XX	15.79	Pembangunan Jembatan Kecamatan lubuk dalam	
103	XX	15.80	Pembangunan Jembatan Kecamatan tualang	
103	XX	15.81	Pembangunan Jembatan Kecamatan minas	
103	XX	15.82	Pembangunan Jembatan Kecamatan kandis	
103	XX	15.83	Pembangunan Jembatan Kecamatan sungai mandau	
103	XX	17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/ BRONJONG	
103	XX	17.01	PERENCANAAN TURAP/TALUD/BRONJONG	
103	XX	17.02	REHABILITASI/PEMELIHARAAN TURAP/TALUD/BRONJONG	
103	XX	17.03	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Siak	
103	XX	17.04	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Mempura	
103	XX	17.05	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bungaraya	
103	XX	17.06	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	17.07	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Sungai Apit	
103	XX	17.08	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Tualang	
103	XX	17.12	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Sungai Mandau	
103	XX	17.13	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Pusako	
103	XX	17.14	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Koto Gasib	
103	XX	18	PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	
103	XX	18.32	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH I	
103	XX	18.33	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH II	
103	XX	18.34	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH III	
103	XX	18.35	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH IV	
103	XX	18.36	PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KAB. SIAK WILAYAH V	
103	XX	18.37	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Siak	
103	XX	18.38	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Mempura	
103	XX	18.39	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	18.40	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Pusako	
103	XX	18.41	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Koto Gasib	
103	XX	18.42	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Kerinci Kanan	
103	XX	18.43	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Tualang	
103	XX	18.44	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Kandis	
103	XX	18.45	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Dayun	
103	XX	18.46	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Bungaraya	
103	XX	18.47	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Sungai Apit	
103	XX	18.48	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Lubuk Dalam	
103	XX	18.49	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Minas	
103	XX	18.50	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Sungai Mandau	
103	XX	21	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	
103	XX	21.01	PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU	
103	XX	21.02	Pengembangan kota hijau (P2KH)	
103	XX	21.03	Pembangunan/peningkatan ruang terbuka publik Kab. Siak	
103	XX	21.04	Perencanaan Taman Kabupaten Siak	
103	XX	21.05	Monitoring dan Evaluasi	
103	XX	21.06	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Siak	
103	XX	21.07	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Mempura	
103	XX	21.08	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Tualang	
103	XX	21.09	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Bungaraya	
103	XX	21.10	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Dayun	
103	XX	21.11	Study Kelayakan Pembangunan dan Pengembangan RTH	
103	XX	21.12	Penyusunan Data Base RTH	

1			2	3
103	XX	21.13	Pengadaan Lahan Taman	
103	XX	21.14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan dan Permakaman	
103	XX	21.15	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Sungai Mandau	
103	XX	21.16	Penyusunan Data Base Areal Pemakaman	
103	XX	21.17	Perencanaan Areal Pemakaman Kabupaten Siak	
103	XX	21.18	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Koto Gasib	
103	XX	21.19	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Kerinci Kanan	
103	XX	21.20	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Sungai Apit	
103	XX	21.21	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	21.22	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Pusako	
103	XX	21.23	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Kandis	
103	XX	21.24	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Minas	
103	XX	21.25	Pembangunan Taman Rekreasi di Kecamatan Lubuk Dalam	
103	XX	21.26	Pemeliharaan rutin areal pemakaman kabupaten siak	
103	XX	23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	
103	XX	23.11	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN BENGKEL ALAT-ALAT BERAT	
103	XX	23.12	Pengadaan Alat-alat Berat	
103	XX	24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	
103	XX	24.01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI KECAMATAN SABAK AUH	
103	XX	24.02	PEMELIHARAAN FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN	
103	XX	24.03	PENINGKATAN JARINGAN PENGAIRAN DAERAH IRIGASI RAWA KECAMATAN SABAK AUH	
103	XX	24.04	Peningkatan Jaringan Pengairan Daerah Irigasi Rawa Kecamatan Bungaraya	
103	XX	24.05	Peningkatan Jaringan Pengairan Daerah Irigasi Rawa Kecamatan Sungai Apit	
103	XX	24.15	Peningkatan Jaringan Pengairan Daerah Irigasi Rawa Kecamatan Pusako	
103	XX	24.16	Peningkatan Jaringan Pengairan Daerah Irigasi Rawa Kecamatan Sungai Mandau	
103	XX	24.17	DED Bangunan Air dan Jaringan Pengairan Kabupaten Siak	
103	XX	24.18	Peningkatan Jaringan Pengairan Daerah Irigasi Rawa Kecamatan Kandis	
103	XX	24.19	Pembangunan Bangunan Air dan Prasarana Irigasi Kabupaten Siak	
103	XX	24.42	Pembangunan Leoning Beton Wilayah V (Kec. Minas dan Kandis)	
103	XX	28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	
103	XX	28.22	NORMALISASI SALURAN/ SUNGAI KABUPATEN SIAK	
103	XX	28.23	PEMELIHARAAN RUTIN DRAINASE/SALURAN KABUPATEN SIAK	
103	XX	28.24	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Siak	
103	XX	28.25	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Mempura	
103	XX	28.26	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Bungaraya	
103	XX	28.27	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Sabak Auh	
103	XX	28.28	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Sungai Apit	
103	XX	28.29	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Pusako	
103	XX	28.30	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Lubuk Dalam	
103	XX	28.31	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Koto Gasib	
103	XX	28.32	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Kerinci Kanan	
103	XX	28.33	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Dayun	
103	XX	28.34	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Tualang	
103	XX	28.35	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Minas	
103	XX	28.36	Pembangunan Leoning Beton Kecamatan Kandis	
103	XX	28.37	Pembangunan Pintu Air Kabupaten siak	
103	XX	28.38	Pembangunan Leoning Beton Wilayah I (Kec. Siak dan Mempura)	
103	XX	28.39	Pembangunan Leoning Beton Wilayah II (Kec. Dayun, Koto Gasib, Lubuk Dalam dan Kerinci Kanan)	
103	XX	28.40	Pembangunan Leoning Beton Wilayah III (Kec. Tualang dan Sungai Mandau)	
103	XX	28.41	Pembangunan Leoning Beton Wilayah IV (Kec. Pusako, Sungai Apit, Sabak Auh dan Bungaraya)	
103	XX	28.42	Pembangunan Leoning Beton Wilayah V (Kec. Minas dan Kandis)	
103	XX	42	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	
103	XX	42.01	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	
103	XX	42.02	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	
103	XX	42.03	Revisi rencana tata ruang	
103	XX	42.04	Survey dan pemetaan	
103	XX	42.05	Penyusunan Ranperda Tata Ruang	
103	XX	42.06	Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan	
103	XX	42.07	Rapat koordinasi tata ruang	

1			2	3
103	XX	44	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
103	XX	44.01	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
103	XX	44.02	PENILAIAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
103	XX	44.03	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	
103	XX	44.04	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	
103	XX	44.05	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
103	XX	44.06	Pengadaan sarana publikasi penataan ruang	
103	XX	44.09	Pendataan Bangunan Gedung Kab. Siak	
103	XX	45	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	
103	XX	45.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	
103	XX	45.02	PENYUSUNAN DOKUMEN RAKP DAN INVENTARISASI ASET PUSAKA	
103	XX	45.03	PENYUSUNAN RTBL KAWASAN PUSAKA PRIORITAS	
103	XX	45.04	Pembangunan bangunan gedung pemerintahan dan fasilitas pendukung	
103	XX	45.05	Pembangunan bangunan pendidikan dan fasilitas pendukung	
103	XX	45.06	Pembangunan gedung fasilitas sosial dan sarana pendukung	
103	XX	45.07	Pembangunan gedung fasilitas umum	
103	XX	45.08	Penataan kawasan strategis kabupaten	
103	XX	45.09	Pemeliharaan bangunan gedung	
103	XX	45.10	Pemeliharaan bangunan bersejarah	
103	XX	46	Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	
103	XX	46.01	Pembangunan Drainase Wilayah I (Kec. Sei Apit, Kec. Pusako, Kec. Sabak Auh, Kec. Bunga Raya)	
103	XX	46.02	Pembangunan Drainase Wilayah II (Kec. Siak, Kec. Mempura, Kec. Dayun, Kec. Koto Gasib)	
103	XX	46.03	Pembangunan Drainase Wilayah III (Kec. Kerinci Kanan, Kec. Lubuk Dalam, Kec. Tualang)	
103	XX	46.04	Pembangunan Drainase Wilayah IV (Kec. Kandis, Kec. Minas, Kec. Sei Mandau)	
103	XX	46.05	Pemeliharaan Drainase Wilayah I (Kec. Sei Apit, Kec. Pusako, Kec. Sabak Auh, Kec. Bunga Raya)	
103	XX	46.06	Pemeliharaan Drainase Wilayah II (Kec. Siak, Kec. Mempura, Kec. Dayun, Kec. Koto Gasib)	
103	XX	46.07	Pemeliharaan Drainase Wilayah III (Kec. Kerinci Kanan, Kec. Lubuk Dalam, Kec. Tualang)	
103	XX	46.08	Pemeliharaan Drainase Wilayah IV (Kec. Kandis, Kec. Minas, Kec. Sei Mandau)	
103	XX	47	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM	
103	XX	47.01	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA AIR MINUM	
103	XX	47.02	PENINGKATAN PELAYANAN AIR MINUM	
103	XX	47.03	Pamsimas/Penyediaan Air Bersih Perdesaan Kabupaten Siak	
103	XX	47.04	Pembangunan/Peningkatan SPAM dan Jaringan Kab. Siak	
103	XX	47.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Minum	
103	XX	47.06	Pendidikan dan Pelatihan Personil UPTD SPAM	
103	XX	47.07	Perencanaan SPAM dan Jaringan Kab. Siak	
103	XX	48	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
103	XX	48.01	PEMBANGUNAN PRASARANA SANITASI	
103	XX	48.02	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA AIR LIMBAH	
103	XX	48.03	PENGADAAN SARANA SANITASI	
103	XX	48.04	Pembangunan Sanitasi MCK Wilayah I (Kec. Sei Apit, Kec. Pusako, Kec. Sabak Auh, Kec. Bunga Raya)	
103	XX	48.05	Pembangunan Sanitasi MCK Wilayah II (Kec. Siak, Kec. Mempura, Kec. Dayun, Kec. Koto Gasib)	
103	XX	48.06	Pembangunan Sanitasi MCK Wilayah III (Kec. Kerinci Kanan, Kec. Lubuk Dalam, Kec. Tualang)	
103	XX	48.07	Pembangunan Sanitasi MCK Wilayah IV (Kec. Kandis, Kec. Minas, Kec. Sei Mandau)	
103	XX	49	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
103	XX	49.01	Perencanaan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	
103	XX	49.02	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Kabupaten Siak	
104			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
104	XX	15	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	
104	XX	15.01	OPERASIONAL PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

1			2	3
104	XX	15.02	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah I (Kec. Sei Apit, Kec. Pusako, Kec. Sabak Auh, Kec. Bunga Raya)	
104	XX	15.03	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah II (Kec. Siak, Kec. Mempura, Kec. Dayun, Kec. Koto Gasib)	
104	XX	15.04	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah III (Kec. Kerinci Kanan, Kec. Lubuk Dalam, Kec. Tualang)	
104	XX	15.05	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah IV (Kec. Kandis, Kec. Minas, Kec. Sei Mandau)	
104	XX	15.06	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kecamatan Tualang	
104	XX	15.07	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kecamatan Minas	
104	XX	15.08	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kecamatan Kandis	
104	XX	15.09	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kecamatan Koto Gasib	
104	XX	15.10	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Wilayah I (Kec. Sei Apit, Kec. Pusako, Kec. Sabak Auh, Kec. Bunga Raya)	
104	XX	15.11	Pemeliharaan JalanLingkungan Wilayah II (Kec. Siak, Kec. Mempura, Kec. Dayun, Kec. Koto Gasib)	
104	XX	15.12	Pemeliharaan JalanLingkungan Wilayah III (Kec. Kerinci Kanan, Kec. Lubuk Dalam, Kec. Tualang)	
104	XX	15.13	Pemeliharaan JalanLingkungan Wilayah IV (Kec. Kandis, Kec. Minas, Kec. Sei Mandau)	
104	XX	16	Program Pengembangan Perumahan	
104	XX	16.01	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Wilayah I (Kec. Sei Apit, Kec. Pusako, Kec. Sabak Auh, Kec. Bunga Raya) (Swakelola)	
104	XX	16.02	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Wilayah II (Kec. Siak, Kec. Mempura, Kec. Dayun, Kec. Koto Gasib) (Swakelola)	
104	XX	16.03	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Wilayah III (Kec. Kerinci Kanan, Kec. Lubuk Dalam, Kec. Tualang) (Swakelola)	
104	XX	16.04	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Wilayah IV (Kec. Kandis, Kec. Minas, Kec. Sei Mandau) (Swakelola)	
104	XX	16.05	Penyusunan dokumen perencanaan bidang perumahan dan permukiman	
104	XX	16.06	Monitoring Penyediaan Perumahan	
104	XX	16.07	Monitoring Sarana dan Prasarana Perumahan	
104	XX	16.08	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan	
105			Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
105	XX	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
105	XX	15.07	Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
105	XX	15.08	Pelatihan Pemberdayaan Aparatur Kecamatan	
105	XX	15.09	Pelatihan Dasar Tenaga Linmas Kabupaten Siak	
105	XX	15.10	Lingkungan Tertib Belajar Kabupaten Siak (LTBKS)	
105	XX	15.11	Orientasi Manajemen Linmas	
105	XX	15.12	Monitoring dan Pengawasan Anggota Linmas Kecamatan se Kabupaten Siak	
105	XX	15.13	Penyuluhan Kepada Masyarakat	
105	XX	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	
105	XX	16.07	Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Satpol-PP	
105	XX	16.08	Pelaksanaan Jambore Satpol-PP	
105	XX	16.09	Pengamanan Tempat-tempat Penting	
105	XX	16.10	Pengawasan Pejabat dan Orang-orang Penting	
105	XX	16.11	Operasi Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	
105	XX	16.12	Kerjasama Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	
105	XX	16.13	Pendidikan dan pelatihan Formal	
105	XX	16.14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
105	XX	16.15	Pembinaan Mental dan Fisik dan Kesamptaan Aparatur	
105	XX	16.16	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	
105	XX	16.17	Peningkatan Kerja Sama Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	
105	XX	16.18	Operasional Sekretariat PPNS Kabupaten Siak	
105	XX	16.19	Penegakan Disiplin (Razia/Sidak) PNS di Lingkungan Kabuapten Siak	
105	XX	16.20	Tingkat Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Kabupaten Siak	
106			Sosial	
106	XX	15	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	
106	XX	15.01	Stimulasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) - Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Fakir Miskin	
106	XX	15.02	Kegiatan Usaha Berkelanjutan Kelompok (KUBE-PKH) Keluarga Sangat Miskin	

1			2	3
106	XX	15.03	Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial	
106	XX	15.04	Pembentukan dan Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kecamatan	
106	XX	15.05	Hari Pahlawan Nasional	
106	XX	15.06	Rapat-rapat koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial	
106	XX	15.07	Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin dan PMKS Lainnya	
106	XX	15.08	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
106	XX	15.09	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	
106	XX	15.10	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	
106	XX	15.11	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin	
106	XX	15.12	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Keluarga Sangat Miskin	
106	XX	15.13	Kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak LayakHuni Keluarga Fakir Miskin	
106	XX	15.14	Kegiatan Perbaikan Sarana dan Prasanana Lingkungan Keluarga Miskin	
106	XX	15.15	Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	
106	XX	15.16	Kegiatan Updating dan Pengolahan Data Fakir Miskin dan PMKS Lainnya	
106	XX	15.17	Kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PSKS	
106	XX	15.18	Pengadaan Aplikasi E-Kemiskinan	
106	XX	15.19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	
106	XX	15.20	Pelatihan Pendataan, Verifikasi Data Kemiskinan dan PMKS lainnya.	
106	XX	15.21	Pendampingan Bantuan Sosial Pangan	
106	XX	15.22	Pengusulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	
106	XX	22	Program Rehabilitasi Sosial	
106	XX	22.01	Rehabilitasi Sosial Anak di Luar Pant	
106	XX	22.02	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Luar Pant	
106	XX	22.03	Rehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas di Luar Pant	
106	XX	22.04	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Luar Pant	
106	XX	22.05	Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas	
106	XX	22.06	Rujukan Rehabilitasi Sosial ke Pant	
106	XX	24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
106	XX	24.01	Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESSOS)	
106	XX	24.02	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	
106	XX	24.03	Peningkatan Kapasitas SDM Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
106	XX	24.04	Buffer Stock dan Penyelenggaraan Penyaluran Bansos	
106	XX	24.05	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Kampung Siaga Bencana	
106	XX	24.06	Kegiatan Peringatan Bulan Bhakti TAGANA Nasional	
106	XX	24.07	Kegiatan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar	
106	XX	24.08	Kegiatan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas Berat	
106	XX	24.09	Kegiatan Pendampingan Psikososial Korban Bencana	
106	XX	24.10	Kegiatan Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS)	
106	XX	24.11	Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Covid-19	Perubahan
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
201			Tenaga Kerja	
201	XX	15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	
201	XX	15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	
201	XX	15.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prsarana BLK/ Workshop	
201	XX	15.08	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	
201	XX	16	Program Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja	
201	XX	16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	
201	XX	16.02	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	
201	XX	16.03	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	
201	XX	16.04	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	
201	XX	16.05	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	
201	XX	16.06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	
201	XX	16.07	Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair	
201	XX	17	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
201	XX	17.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
201	XX	17.03	Pelaksanaan dan Penguatan Fungsi LKS Tripartit Kabupaten Siak	

1			2	3
201	XX	17.17	Penyusunan dan Penerapan Sistem Pengupahan Untuk Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Siak	
201	XX	17.19	Pembinaan supervisi hubungan industrial	
201	XX	17.22	Monitoring dan Evlauasi	
201	XX	17.23	Sosialisasi standar pengupahan minimal daerah	
201	XX	17.24	Pelaksanaan verifikasi dan pembinaan serikat pekerja / serikat buruh se - Kabupaten Siak	
201	XX	17.25	Survey Data Kehidupan layak	
202			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
202	XX	15	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
202	XX	15.01	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	
202	XX	15.03	Pembinaan dan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Siak	
202	XX	15.04	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	
202	XX	15.05	Pelaksanaan HUT Hari Ibu	
202	XX	15.06	Sistem Informasi Gender	
202	XX	15.07	Peningkatan Ketersediaan Data Gender	
202	XX	15.08	Pengarustamaan Gender Dalam Berbagai Bidang	
202	XX	15.09	Peningkatan Perlindungan Khusus bagi Perempuan	
202	XX	15.10	Peningkatan Perlindungan Perempuan dari Tindak kekerasan	
202	XX	15.11	Fasilitas Informasi Data Anak	
202	XX	15.12	Pengembangan Minat Bakat Anak	
202	XX	16	Program Perlindungan Anak	
202	XX	16.01	Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	
202	XX	16.05	Pembinaan Potensi dan Partisipasi Anak	
202	XX	16.06	Pembinaan dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak	
202	XX	16.07	Penyediaan Informasi Data Anak	
202	XX	16.08	Pengembangan Minat Bakat Anak	
203			Pangan	
203	XX	15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	
203	XX	15.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan	
203	XX	15.02	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	
203	XX	15.03	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	
203	XX	15.04	Pemantauan Akses, Pasokan dan Harga Pangan	
203	XX	15.05	Pengembangan dan pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	
203	XX	15.06	Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	
203	XX	15.07	Pengembangan desa mandiri pangan	
203	XX	15.08	HKP-HPS dan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan	
203	XX	15.09	Penyusunan Database dan Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	
203	XX	16	PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KONSUMSI PANGAN	
203	XX	16.01	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	
203	XX	16.02	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (agropolitan)	
203	XX	16.03	Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	
203	XX	16.04	Pengembangan Pangan Lokal	
203	XX	16.05	Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu	
203	XX	17	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	
203	XX	17.01	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	
203	XX	17.02	Peningkatan kompetensi SDM Keamanan Pangan	
204			Pertanahan	
204	XX	15	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	
204	XX	15.11	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	
204	XX	15.12	Identifikasi, Inventarisasi Nama unsur Rupabumi di Kabupaten Siak	
204	XX	16	Program penataan penguasaan; kepemilikan; penggunaan; dan pemanfaatan tanah	
204	XX	1.604	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	
204	XX	16.07	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	
204	XX	16.13	Informasi tanah desa di Kecamatan Tualang	
204	XX	16.14	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	
204	XX	16.15	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Lubuk Dalam	
204	XX	16.16	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Pusako	
204	XX	16.17	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Mempura	
204	XX	16.18	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	
204	XX	16.19	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Sungai Apit	
204	XX	16.20	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Sungai Mandau	

1			2	3
204	XX	16.21	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Minas	
204	XX	16.22	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Kerinci Kanan	
204	XX	16.22	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Kandis	
204	XX	17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
204	XX	17.01	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
204	XX	17.02	Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan	
205			Lingkungan Hidup	
205	XX	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
205	XX	15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	
205	XX	15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
205	XX	15.14	Peningkatan operasi dan pemeliharaan TPA kabupaten siak	
205	XX	15.15	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	
205	XX	15.16	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	
205	XX	15.17	Pembangunan / peningkatan TPA kabupaten siak	
205	XX	15.18	Koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura	
205	XX	15.19	Pengelolaan B3 dan limbah B3	
205	XX	15.20	Pembangunan TPA Kec. Dayun	
205	XX	15.21	Pembangunan TPA Kec. Kandis	
205	XX	15.22	Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan (DAK)	Perubahan
205	XX	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
205	XX	16.01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	
205	XX	16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	
205	XX	16.10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	
205	XX	16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	
205	XX	16.17	Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup	
205	XX	16.18	Kegiatan Penilaian AMDAL	
205	XX	16.19	Kegiatan Pengawasan AMDAL	
205	XX	16.20	Kegiatan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	
205	XX	16.21	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Bio Massa)	
205	XX	16.22	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan Hidup / Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	
205	XX	16.23	Kegiatan Workshop dan sosialisasi penegakan hukum lingkungan	
205	XX	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
205	XX	17.13	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan	
205	XX	17.14	Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air	
205	XX	17.15	Peningkatan Peran Masyarakat dalam perlindungan kerusakan ekosistem Gambut	
205	XX	19	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	
205	XX	19.07	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	
205	XX	19.08	Pekan Lingkungan Hidup dalam rangka hari lingkungan hidup	
205	XX	19.09	Kegiatan Desa Percontohan Proklamasi (Program Kampung Iklim)	
206			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
206	XX	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
206	XX	15.12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	
206	XX	15.15	Pelayanan langsung Kartu Identitas Anak (KIA)	
206	XX	15.16	Pelayanan Keliling Pembuatan Akte Kelahiran	
206	XX	15.17	Pelayanan Keliling Pembuatan Kartu Keluarga	
206	XX	15.18	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	
206	XX	15.19	Pengembangan Data Base Kependudukan	
206	XX	15.20	Pengembangan Kartu SAM (Secure Akses Modul)	
206	XX	15.21	Pelayanan Keliling Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP_el)	
206	XX	15.22	Penyediaan Informasi Yang Dapat di Akses Masyarakat	
206	XX	15.23	Penyediaan Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil	
206	XX	15.24	Penyediaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk	
206	XX	15.25	Pengelolaan Data Kependudukan	
206	XX	15.26	Pemeliharaan Perangkat SIAK	
206	XX	15.27	Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester	
206	XX	15.28	Pemanfaatan Data Kependudukan	
206	XX	15.29	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rakornas (Rapat Kerja Nasional)	
206	XX	15.30	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Data Kependudukan	
206	XX	15.31	Penataan Dan Pengelolaan Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak	

1			2	3
206	XX	15.32	Penataan dan Pembangunan Jaringan Komunikasi Data	
206	XX	15.33	Integrasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan	
206	XX	15.34	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
207			Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
207	XX	20	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha ekonomi Kampung	
207	XX	20.02	Perlombaan Kampung binaan Program P2WKSS	
207	XX	20.03	Perlombaan Kampung dan kelurahan	
207	XX	20.07	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
207	XX	20.08	Kampung Binaan Keluarga Sakinah	
207	XX	20.12	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	
207	XX	20.16	Pembinaan Program Pemberdayaan Kampung (PPK)	
207	XX	20.17	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	
207	XX	20.18	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kampung	
207	XX	20.19	Temu Karya LPM Kampung dan Kelurahan Se Kabupaten Siak	
207	XX	20.20	Pembinaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (P3MK)	
207	XX	20.21	Temu Wicara	
207	XX	20.22	Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
207	XX	20.23	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung	
207	XX	20.24	Sosialisasi Pengurus LPM	
207	XX	20.25	Pelatihan Manajemen Posyantek	
207	XX	20.26	Pelatihan Pengelolaan Potensi Kampung	
207	XX	20.27	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	
207	XX	20.28	Sosialisasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	
207	XX	20.29	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	
207	XX	20.30	Pelatihan Petugas Pendamping Lembaga Ekonomi Perkampungan	
207	XX	21	Program Penguatan Pemerintahan Kampung	
207	XX	21.14	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	
207	XX	21.17	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif (Pemilihan Penghulu)	
207	XX	21.24	Pelatihan Aparatur Pemerintah Kampung dalam Bidang pengelolaan Keuangan Kampung	
207	XX	21.28	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kampung	
207	XX	21.31	Monitoring Pelaksanaan APBKam dan Pengelolaan Aset Kampung	
207	XX	21.32	Sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Kampung dan Aset Kampung	
207	XX	21.33	Bimbingan Teknis Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)	
207	XX	21.34	Rapat koordinasi Aparatur pemerintah daerah dengan kampung adat	
207	XX	21.35	Pelatihan Pengelolaan Potensi Kampung	
207	XX	21.36	Bimbingan teknis penyusunan LPPK dan LKPPK	
207	XX	21.37	Pelatihan Kepemimpinan Penghulu Kampung	
207	XX	21.38	Penyusunan pedoman tata cara pengelolaan barang milik kampung	
207	XX	21.39	Bimbingan teknis pengelolaan barang milik kampung	
207	XX	21.40	Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM dan RKP Kampung	
207	XX	21.41	Pembinaan Penghulu Kampung, Penghulu Kampung Adat, Ketua Lembaga Adat, dan Ketua Bappekam se-Kabupaten Siak	
207	XX	21.42	Pelacakan dan Pengukuran Batas Kampung/ Kelurahan	
207	XX	21.43	Review Pelacakan dan Pengukuran Batas Kampung/ Kelurahan	
207	XX	21.44	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung	
207	XX	21.45	Pembentukan Kampung	
207	XX	21.46	Pelatihan Perencanaan Pembangunan Kampung	
208			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
208	XX	15	Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	
208	XX	15.03	Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi pada Momen Khusus	
208	XX	15.04	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)	
208	XX	15.05	Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
208	XX	15.06	Internalisasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan di Kabupaten Siak	
208	XX	15.07	Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan KB/KR dan Pengendalian Kependudukan	
208	XX	15.08	Pembinaan Keluarga Berencana	
208	XX	15.09	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Kegiatan (Poktan) Ketahanan Keluarga	
208	XX	15.10	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kelompok Kegiatan (POKTAN)	
208	XX	15.11	Penyediaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan KB dan Ketahanan Keluarga	

1			2	3
208	XX	15.12	Peningkatan Pembinaan POKTAN dan Distribusi Alokasi dalam Mendukung Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (DAK)	
208	XX	15.13	Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) (DAK)	
208	XX	15.14	Pelayanan Administrasi Balai Penyuluh (DAK)	
208	XX	15.15	Penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Kependudukan Kabupaten Siak	
208	XX	16	Program Advokasi dan KIE Kependudukan dan Keluarga Berencana	
208	XX	16.01	Publikasi dan KIE berbasis Kependudukan	
208	XX	16.02	Fasilitasi Informasi ketersediaan data keluarga dan kependudukan	
208	XX	16.03	Penyusunan Kebijakan dan Strategi grand design Pembangunan Kependudukan	
209			Perhubungan	
209	XX	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
209	XX	15.06	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
209	XX	15.07	Monitoring evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan fasilitas Perlangkapan Jalan	
209	XX	15.08	Penyusunan kebijakan; norma; standar dan prosedur bidang perhubungan	
209	XX	15.09	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	
209	XX	15.10	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	
209	XX	15.11	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	
209	XX	15.12	Monitoring; Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perhubungan Laut	
209	XX	15.13	Pembangunan fasilitas Pelabuhan di Kabupaten Siak	
209	XX	15.14	Peningkatan pengelolaan terminal Pelabuhan Buton	
209	XX	15.15	Peningkatan pengelolaan terminal Pelabuhan Siak	
209	XX	15.16	Peningkatan pengelolaan terminal Pelabuhan Buton	
209	XX	15.17	Pembangunan Dermaga	
209	XX	15.18	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	
209	XX	15.19	Pembangunan Dermaga Penyebrangan Penumpang	
209	XX	15.20	Rehabilitasi/ pemeliharaan pelabuhan	
209	XX	15.21	Perencanaan Bidang angkutan Sungai	
209	XX	15.22	Pembangunan pelabuhan Siak	
209	XX	15.23	Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan fasilitas Perhubungan Laut dan SDP	
209	XX	15.24	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	
209	XX	15.25	Pembangunan Pelabuhan Rakyat	
209	XX	15.26	Penyusunan Dokumen Amdal di Bidang Perhubungan Laut	
209	XX	15.27	Pembangunan dermaga penyeberangan Ro - Ro	
209	XX	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
209	XX	16.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	
209	XX	16.05	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	
209	XX	16.06	Monitoring evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan fasilitas Perlangkapan Jalan	
209	XX	16.07	Rehabilitasi atau pemeliharaan Terminal	
209	XX	16.08	Rehabilitasi atau pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	
209	XX	17	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	
209	XX	17.05	Pemanduan pejabat dan tamu-tamu daerah	
209	XX	17.06	Penyusunan Dokumen Amdal (dalop)	
209	XX	17.07	Pengendalian lalu lintas Kegiatan Pemerintah	
209	XX	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
209	XX	18.01	Pembangunan Gedung Terminal	
209	XX	18.02	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	
209	XX	18.03	Pengadaan APILL (Alat pemberi isyarat lampu lalu lintas)	
209	XX	18.04	Peningkatan, Pengelolaan dan Pengembangan Taman Lalu Lintas	
209	XX	18.05	Koordinasi Penilaian kota tertib lalu lintas	
209	XX	18.06	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa Transportasi Darat	
209	XX	18.07	Perencanaan Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
209	XX	18.08	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	
209	XX	18.09	Perencanaan Bidang Angkutan Umum	
209	XX	18.10	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	
209	XX	18.11	Perencanaan Bidang Keselamatan Transportasi Jalan	
209	XX	18.12	Perencanaan Studi Kelayakan Terminal	
209	XX	18.13	Pengadaan Marka Jalan	
209	XX	18.14	Penyusunan Dokumen Amdal di Bidang Perhubungan Darat	
209	XX	18.15	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	
209	XX	18.16	Pengolaan dan Pelaksanaan Menegeman dan Rekayasa Lalu Lintas	
209	XX	18.17	Monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang Perhubungan Darat	

1			2	3
209	XX	18.18	Penyusunan DED Landscape terminal	
209	XX	18.19	Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Sarana dan Prasarana Perhubungan	
209	XX	19	Program Peningkatan kelaihan pengoperasian kendaraan bermotor	
209	XX	19.02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	
209	XX	19.03	Peningkatan dan pengembangan gedung pengujian kendaraan bermotor	
209	XX	19.04	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	
209	XX	19.05	Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	
209	XX	19.06	Rehabilitasi/ pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	
209	XX	19.07	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	
209	XX	19.08	Fasilitas Perijinan di Bidang Perhubungan	
209	XX	20	Program peningkatan pelayanan angkutan	
209	XX	20.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.	
209	XX	20.08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	
209	XX	20.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	
209	XX	20.13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	
209	XX	20.20	Pengoperasian dan pemeliharaan bus sekolah dan angkutan umum	
209	XX	20.21	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/ Juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	
209	XX	20.22	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	
209	XX	20.23	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	
209	XX	20.24	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	
209	XX	20.25	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	
209	XX	20.26	Kegiatan Penataan tempat - tempat pemberhentian angkutan umum	
209	XX	20.27	Monitoring Penataan tempat - tempat Lokasi parkir Di Kab Siak	
209	XX	20.28	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan lingkungan terminal	
209	XX	20.29	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat ; tepat; murah dan mudah	
209	XX	20.30	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	
209	XX	20.31	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	
209	XX	20.32	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	
209	XX	20.33	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
209	XX	20.34	Koordinasi dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
210			Komunikasi dan Informatika	
210	XX	15	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi Publik	
210	XX	15.01	Pengelolaan Informasi Publik	
210	XX	15.02	Pelayanan Informasi Publik	
210	XX	15.03	Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat	
210	XX	15.04	peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik	
210	XX	15.05	layanan interoperabilitas dan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan (Pusat API daerah)	
210	XX	15.06	Pengelolaan Saluran Komunikasi Milik PEMDA/Media Internal	
210	XX	15.07	Infoterial/mininfoterial pembangunan daerah melalui media cetak dengan pemerintah daerah	
210	XX	15.08	Penyebarluasan melalui media cetak	
210	XX	15.09	Penyebarluasan melalui media elektronik	
210	XX	15.10	Penyebarluasan melalui media internet/media on line	
210	XX	16	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	
210	XX	16.01	Penyelenggaraan dan Pengelolaan akses internet pemerintah dan publik	
210	XX	16.02	Penyelenggaraan dan Pengembangan Data Centre (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)	
210	XX	16.03	Pemeliharaan Infrastruktur Berbagi pakai e-Government	
210	XX	17	Program pengembangan e-government dan smart city	
210	XX	17.01	Layanan Sistem Informasi Smart City	
210	XX	17.02	penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Smart City	
210	XX	17.03	Pemeliharaan ekosistem smart city	
210	XX	17.04	Penyelenggaraan Infrastruktur Teleconference	
211			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
211	XX	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	

1			2	3
211	XX	16.01	Promosi komoditi unggulan daerah	
211	XX	16.02	Sosialisasi Dukungan Informasi Permodalan	
211	XX	16.03	Peningkatan kualitas produk UKM	
211	XX	16.04	Inventarisasi perkembangan UMKM Kabupaten Siak	
211	XX	16.05	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan baru (Mikro)	
211	XX	16.06	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keterampilan Produk Unggulan UMKM	
211	XX	16.07	Pengembangan Jaringan Pemasaran Bagi Produk Unggulan UMKM	
211	XX	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
211	XX	18.01	Pemeringkatan Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi (Dalam Rangka Tk. Kabupaten, Propinsi Pusat)	
211	XX	18.02	Peningkatan kinerja pelaku / Pengurus koperasi	
211	XX	18.03	Pelatihan peningkatan kompetensi bagi pengurus / pengelolaan koperasi	
211	XX	18.04	Pelatihan Audit dan Akuntansi Koperasi	
211	XX	18.05	Penguatan Kelembagaan Koperasi Berbasis Syariah	
211	XX	18.06	Peningkatan pengkaderan bagi pemandu koperasi	
211	XX	18.07	Pelatihan kewirausahaan bagi pengurus koperasi	
211	XX	18.08	Peningkatan kerjasama dibidang HAKI bagi anggota koperasi pelaku usaha	
211	XX	18.09	Revitalisasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Syariah	
211	XX	18.10	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	
212			Penanaman Modal	
212	XX	15	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
212	XX	15.01	Survey Perizinan	
212	XX	15.02	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	
212	XX	15.03	Penyelenggaraan Pameran Investasi	
212	XX	15.04	Monitoring Perizinan	
212	XX	15.05	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif	
212	XX	15.06	Penyusunan dan Perbanyak Buku Himpunan Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	
212	XX	15.07	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	
212	XX	15.08	Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah	
212	XX	15.09	Pengembangan potensi unggulan daerah	
212	XX	15.10	Pelaksanaan Warta Promosi Daerah	
212	XX	15.11	Penyusunan dan Pengadaan Bahan Promosi Daerah	
212	XX	15.12	Pendampingan calon investor Penanaman Modal di Kabupaten Siak	
212	XX	16	Optimalisasi Pelayanan Publik	
212	XX	16.01	Pengadaan anjungan Informasi mandiri	
212	XX	16.02	Pelayanan cepat tanggap	
212	XX	16.03	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	
212	XX	16.04	Rapat Koordinasi Perizinan dan Kebijakan Perizinan	
212	XX	16.05	Pendampingan calon investor Penanaman Modal di Kabupaten Siak	
213	XX	16.06	Survey Perizinan	
214	XX	16.07	Monitoring Perizinan	
215	XX	16.08	Bimbingan Manajemen Mutu ISO 9001	
216	XX	16.09	Pembinaan Kepada Lembaga Pelayanan Publik	
217	XX	16.10	Peningkatan Sumber daya Aparatur Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	
213			Kepemudaan dan Olah Raga	
213	XX	15	Program Peningkatan peran dan serta kepemudaan	
213	XX	15.01	Pembinaan organisasi kepemudaan	
213	XX	15.02	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibaraka setiap 17 Agustus	
213	XX	15.03	Pelatihan marchingband Kab. Siak	
213	XX	15.04	Pelatihan orkestra kab. Siak	
213	XX	15.05	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Kepemudaan	
213	XX	15.06	Pembinaan dan Pembentukan Pemuda Peduli HIV/AIDS dan Narkoba	
213	XX	15.07	Lomba Kreasi, inovais dan Karla Tulis ilmiah dikalangan Pemuda	
213	XX	15.08	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	
213	XX	15.09	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	
213	XX	15.09	Pendidikan Pelatihan dan Pembinaan Kepemudaan	
213	XX	15.10	Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	
213	XX	15.11	Pertukaran Pemuda Tingkat Nasional	
213	XX	16	Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olahraga	
213	XX	16.01	Pembibitan dan pembinaan olahraga Sepak Takraw	
213	XX	16.02	Kejurda Tingkat Pelajar	
213	XX	16.03	Open Internasional Siak BMX Tahun 2017	
213	XX	16.04	Open Tour Internasional Siak 10 K Tahun 2017	

1			2	3
213	XX	16.05	Penyelenggaraan Event Sepatu Roda	
213	XX	16.06	Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Sepeda	
213	XX	16.07	Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Sepatu Roda	
213	XX	16.08	Pembinaan dan Pelatihan Pelatih Cabang Olahrag	
213	XX	16.09	Mengikuti Pekan Paralympic Pelajar Daerah (paperda)	
213	XX	16.10	Pekan Olah Raga Daerah	
213	XX	16.11	Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Kab.Siak	

1			2	3
213	XX	17	Program Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	
213	XX	17.01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	
213	XX	17.02	Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga	
213	XX	17.03	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Lanscape	
213	XX	17.04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	
214			Statistik	
214	XX	15	Program Pengembangan Data Informasi	
214	XX	15.01	Pencetakan data statistik daerah	
215			Persandian	
215	XX	15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	
215	XX	15.01	Layanan keamanan informasi kepada sistem elektronik pemerintah Daerah	
216			Kebudayaan	
216	XX	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	
216	XX	15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	
216	XX	15.02	Penatagunaan naskah kuno nusantara	
216	XX	15.03	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	
216	XX	15.04	Pemberian penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	
216	XX	15.05	Pembinaan nilai-nilai budaya untuk siswa	
216	XX	15.06	Pemberdayaan bahasa dan sastra daerah	
216	XX	15.07	Pengadaan alat kesenian tradisional	
216	XX	16	Program pengelolaan kekayaan budaya	
216	XX	16.01	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala; museum dan peninggalan bawah air	
216	XX	16.02	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	
216	XX	16.03	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	
216	XX	16.04	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	
216	XX	16.05	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	
216	XX	16.06	Pengelolaan / Pelindungan Benda-Benda Cagar Budaya	
216	XX	17	Program pengelolaan keragaman budaya	
216	XX	17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	
216	XX	17.02	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	
216	XX	17.03	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	
216	XX	17.04	Pelaksanaan festival budaya daerah	
216	XX	17.05	Pembangunan Museum	
216	XX	18	Program pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan	
216	XX	18.01	Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan	
216	XX	18.02	Pembangunan Gedung Lembaga Adat	
217			Perpustakaan	
217	XX	15	Program Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan dan Budaya Baca	
217	XX	15.01	Perpustakaan Digital (e Library)	
217	XX	15.02	Lomba Minat Baca	
217	XX	15.03	Penyediaan Bahan Pustaka, Perpustakaan Umum Daerah	
217	XX	15.04	Identifikasi Pemetaan minat budaya baca	
217	XX	15.05	Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka Daerah	
217	XX	15.06	Manajemen Layanan Digitalisasi	
217	XX	15.07	Pembangunan/ Pemeliharaan Database Perpustakaan	
217	XX	15.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka	
217	XX	15.09	Pembuatan Profile Perpustakaan dikabupaten	
217	XX	16	Program Pembinaan Pengembangan Perpustakaan	
217	XX	16.01	Supervisi:pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum;perpustakaan khusus;perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	
217	XX	16.02	Lomba Perpustakaan Kabupaten; Kampung; Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus	
217	XX	16.03	Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan desa/ke/Sekolah	
217	XX	16.04	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	
217	XX	16.05	Pembinaan dan kerjasama mitra perpustakaan	
217	XX	16.06	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat	
217	XX	16.07	Implementasi Strategis Peningkatan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	

1			2	3
217	XX	16.08	Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis Perpustakaan	
217	XX	16.09	Pembinaan dan Stimulasi bagi Anggota Perpustakaan	
218			Kearsipan	
218	XX	21	Program Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip	
218	XX	21.01	Pembinaan dan Pengelolaan Arsip	
218	XX	21.02	Restorasi Arsip/Dokumen Daerah	
218	XX	21.03	Digitalisasi Arsip	
218	XX	21.04	Pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	

1			2	3
218	XX	21.05	Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/ swasta	
218	XX	21.06	Akuisisi Arsip	
3			URUSAH PEMERINTAHAN PILIHAN	
301			Kelautan dan Perikanan	
301	XX	15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
301	XX	15.01	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidaya Ikan	
301	XX	15.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	
301	XX	15.03	Pengadaan calon induk ikan unggulan	
301	XX	15.04	Pendampingan pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya yang bersumber dari APBN	
301	XX	15.05	Peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan	
301	XX	15.06	Pelatihan SDM Pembudidaya Ikan	
301	XX	16	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
301	XX	16.01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (DAK)	
301	XX	16.02	Lomba Masak Berbahan Serba Ikan dan Sosialisasi Gemar Makan Ikan	
301	XX	16.03	Gelar operasional pengawasan terpadu pengairan	
301	XX	16.04	Pendampingan pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap yang bersumber dari APBN	
301	XX	16.05	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	
302			Pariwisata	
302	XX	15	Program pemasaran pariwisata	
302	XX	15.01	Pekan Safar ``Tradisi Ghatib Beghanyut`` Ritual Tolak Bala	
302	XX	15.02	Penampilan dan festival seni kabupaten siak	
302	XX	15.03	Mengikuti festival dan parade	
302	XX	15.04	Event Tour De Siak	
302	XX	15.05	Pemilihan bujang dan dara tingkat daerah	
302	XX	15.06	Pawai budaya Internasional	
302	XX	15.07	Event Sampan Internasional	
302	XX	15.08	Kejuaraan Pencak Silat dan Sepak Takraw Sijori Tahun 2017	
302	XX	15.09	Pelaksanaan Lomba Lintas Alam di Tahura SSH Minas	
302	XX	15.10	Festival Gasing Internasional Tahun 2017	
302	XX	15.11	Festival Siak Bermadah	
302	XX	15.12	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan dan Kemitraan Pariwisata	
302	XX	15.13	Pelaksanaan Gebyar Wisata Nusantara	
302	XX	15.14	Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	
302	XX	15.15	Pembuatan Space Iklan Promosi Pariwisata	
302	XX	15.16	Penggadaan Bahan Promosi	
302	XX	15.17	Promosi potensi dan objek pariwisata berbasis Media dan IPTEK	
302	XX	15.18	Kejuaraan Pencak Silat dan Sepak Takraw Sijori (Singapura-Johor-Riau)	
302	XX	15.19	Festival Gasing Internasional	
302	XX	15.20	Penampilan dan Festival Seni di Luar Daerah	
302	XX	15.21	Pelaksanaan Festival Film Pendek (FFP)	
302	XX	15.22	Lomba Melukis Keindahan Wisata Kabupaten Siak	
302	XX	15.23	Festival Gerhana Matahari Cincin (GMC)	
302	XX	15.24	Lomba Fotografi Objek Wisata Kabupaten Siak	
302	XX	15.25	Penyelenggaraan Haul Sultan	
302	XX	15.26	Pameran Informasi Pariwisata Siak	
302	XX	16	Program Destinasi dan Industri Pariwisata	
302	XX	16.01	Pelatihan pelaku ekonomi kreatif	
302	XX	16.02	Penataan kawasan objek wisata (DAK)	
302	XX	16.03	Pembangunan taman burung (Lanjutan)	
302	XX	16.04	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Istana Sultan Siak	
302	XX	16.05	Pemeliharaan rutin/berkala Dalam dan Luar Masjid Bersejarah	
302	XX	16.06	Penyusunan Master Plan Destinasi Pariwisata;	
302	XX	16.07	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Destinasi Pariwisata	
302	XX	16.08	Pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata	
302	XX	16.09	Pembangunan landscape taman burung	
302	XX	16.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Kabupaten Siak	
302	XX	16.11	Pemeliharaan rutin/ berkala taman; gedung peninggalan bersejarah	
302	XX	16.12	Penataan Kawasan Wisata di kabupaten Siak	
302	XX	16.13	Perencanaan Penataan Objek Wisata Peninggalan Bersejarah	
302	XX	16.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Peninggalan bersejarah	
302	XX	16.15	Pengadaan; Pembuatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	
302	XX	16.16	Peningkatan Amenitas Pariwisata [DAK]	
302	XX	16.17	Pengembangan Daya Tarik Wisata [DAK]	
302	XX	16.18	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Objek Wisata Taman Burung	
302	XX	16.19	Inventarisasi Pembinaan Destinasi dan Industri Pariwisata	
302	XX	16.20	Reviu RIPDA	

1			2	3
302	XX	16.21	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Perubahan
302	XX	17	Program Pembangunan Ekonomi Kreatif dan SDM Pariwisata	
302	XX	17.01	Penampilan dan festival seni kabupaten siak	
302	XX	17.02	Mengikuti festival dan parade	
302	XX	17.03	Pemilihan bujang dan dara tingkat daerah	
302	XX	17.04	Pawai budaya Internasional	
302	XX	17.05	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	
302	XX	17.06	Pelatihan pelaku ekonomi kreatif	
302	XX	17.07	Sosialisasi Undang-undang, Peraturan Daerah tentang Pariwisata (TDUP)	
302	XX	17.08	Workshop Seni Kreatif Berbasis Budaya	
302	XX	17.09	Workshop Seni Kreatif Berbasis Design dan IPTEK	
302	XX	17.10	Inventarisasi Pembinaan Ekonomi Kreatif dan SDM Pariwisata	
302	XX	17.11	Penampilan Seni Pertunjukan Luar Daerah	
302	XX	17.12	Penampilan Seni Pertunjukan Dalam Daerah	
302	XX	17.13	Pengadaan; Pembuatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif dan SDM Pariwisata	
302	XX	17.14	Workshop dan Lomba Fotografi Pariwisata Siak	
302	XX	17.15	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan (DAK)	
302	XX	17.16	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK)	Perubahan
302	XX	17.17	Pelatihan Manajemen Homestay/ Rumah Wisata/ Pondok Wisata (DAK)	Perubahan
302	XX	17.18	Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya (DAK)	Perubahan
303			Pertanian	
303	XX	15	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	
303	XX	15.01	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi	
303	XX	15.02	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Jagung	
303	XX	15.03	Pengembangan Bibit/Benih Tanaman Pangan	
303	XX	15.04	Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik tanaman pangan dan hortikultura	
303	XX	15.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
303	XX	15.06	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija	
303	XX	15.07	Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor Pertanian	
303	XX	15.08	Pengembangan Demplot Tanaman Pangan UPT Teknologi dan Mekanisasi Pertanian Kec. Sungai Mandau	
303	XX	16	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	
303	XX	16.01	Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran	
303	XX	16.02	Peningkatan Produksi dan Mutu Buah-buahan	
303	XX	16.03	Perluasan Areal Hortikultura	
303	XX	16.04	Pengembangan Demplot Tanaman Holtikultura UPT Teknologi dan Mekanisasi Pertanian Kec. Sungai Mandau	
303	XX	16.05	Pengembangan Benih/Bibit Holtikultura	
303	XX	17	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	
303	XX	17.01	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	
303	XX	17.02	Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Bersubsidi	
303	XX	17.03	Pembangunan/ Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK APBN)	
303	XX	17.04	Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	
303	XX	17.05	Pengadaan alat dan Mesin pasca Panen Pertanian	
303	XX	17.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna	
303	XX	17.07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan/Perbibitan Pertanian	
303	XX	17.08	Workshop Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi	
303	XX	17.09	Pendataan dan Pemetaan Wilayah Lahan Pertanian (DAK)	
303	XX	17.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Penyuluh Pertanian (DAK)	
303	XX	18	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	
303	XX	18.01	Revitalisasi Lahan Perkebunan	
303	XX	18.02	Penanggulangan serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan.	
303	XX	18.03	Inventarisasi, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan perkebunan	
303	XX	18.04	Pemberdayaan lembaga mandiri dan mengakar di masyarakat	
303	XX	18.05	Penyusunan data base dan pemetaan	
303	XX	18.06	Pembinaan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta	
303	XX	18.07	Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang perkebunan.	
303	XX	18.08	Pembinaan dan peningkatan mutu hasil perkebunan	
303	XX	18.09	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	
303	XX	19	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
303	XX	19.01	Peningkatan kemampuan lembaga petani	

1			2	3
303	XX	19.02	Pekan Nasional (PENAS) KTNA	
303	XX	19.03	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	
303	XX	19.04	Bimbingan Teknis Kewirausahaan Pelaku Agribisnis Tanaman Hortikultura	
303	XX	19.05	Lomba Asah Trampil Kelompok Tani Tingkat Kecamatan	
303	XX	19.06	Pekan Daerah (PEDA) KTNA	
303	XX	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	
303	XX	20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	
303	XX	20.02	Penilaian UPTD, Penyuluh dan Kelembagaan Petani Berprestasi	
303	XX	20.03	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	
303	XX	20.04	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Penyuluh Pertanian/Perkebunan	
303	XX	20.05	Penilaian Prestasi di Bidang Pertanian	
303	XX	20.06	Renovasi BPP dan Sarana Prasarana Pendukung BPP	Perubahan
303	XX	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Kesmavet	
303	XX	21.01	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	
303	XX	21.02	Pengendalian Populasi Ternak Terjangkit Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	
303	XX	21.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Wilayah I (DAK)	
303	XX	21.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Wilayah II (DAK)	
303	XX	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
303	XX	22.01	Pengembangan agribisnis peternakan	
303	XX	22.02	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	
303	XX	22.03	Peningkatan sarana dan prasarana di Demplot Jatibaru	
303	XX	22.04	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	
303	XX	22.05	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	
303	XX	22.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Pembibitan Sapi Potong	
303	XX	22.07	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Pembibitan Sapi Potong (DAK)	
304			Energi dan Sumber Daya Mineral	
304	XX	21	Program Pengembangan PJU	
304	XX	21.01	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan PJU Kabupaten Siak	
304	XX	21.02	Pemeliharaan Genset PLTD	
305			Perdagangan	
305	XX	15	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	
305	XX	15.01	Pengawasan UTTP (SPBU, APMS, Pabrik Kelapa Sawit, Masyarakat)	
305	XX	15.02	Pengawasan dan Pelayanan Tera (SPBU, APMS, Pabrik Kelapa Sawit, Masyarakat)	
305	XX	15.03	Pengadaan Alat Standar Kemetrolgian	
305	XX	15.04	Pengawasan Perdagangan	
305	XX	15.05	Kalibrasi Alat-alat standar kemetrolgian	
305	XX	15.06	Magang Tenaga Reparitir	
305	XX	16	Program Pengembangan perdagangan dalam daerah	
305	XX	16.01	Monitoring fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat di Kab. Siak	
305	XX	16.02	Pengawasan pendistribusian paket kebutuhan pokok masyarakat bersubsidi	
305	XX	16.03	Pengembangan sarana perdagangan (pasar rakyat)	
305	XX	16.04	Peningkatan Koordinasi kelembagaan dan kemitraan diantara regulator dan stakeholder	
305	XX	16.05	Identifikasi Produk Unggulan Daerah yang Dapat diikutsertakan Pada Pasar Lelang	
305	XX	16.06	Peningkatan Sistem Informasi terpadu terhadap Perkembangan Harga Kebutuhan Kepokmas dan Barang Penting lainnya	
305	XX	20	Program Pengembangan Kinerja Pasar	
305	XX	20.01	Peningkatan Operasional dan pemeliharaan Pasar	
305	XX	20.02	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk (pengembangan pasar) (DAK)	
305	XX	20.03	Pembangunan Pasar Sungai Apit	
305	XX	20.04	- Peningkatan/pemeliharaan pasar	
305	XX	20.05	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (pembangunan sarana dan prasarana pasar kec. Bungaraya)	
305	XX	20.06	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar	
305	XX	20.07	Penyusunan DED Pembangunan Pasar	
305	XX	20.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar	
306			Perindustrian	
306	XX	15	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	

1			2	3
306	XX	15.01	Magang Pelaku Usaha	
306	XX	15.02	Promosi Produk dan Sentra IKM	
306	XX	15.03	Pelatihan Devirifikasi Produk Industri Kecil dan Menengah	
306	XX	15.04	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Industri Kecil dan Menengah	
306	XX	15.05	Pemetaan Potensi IKM	
306	XX	15.06	Perencanaan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM)	
306	XX	15.07	Pembangunan dan Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM)	
306	XX	15.08	Pelatihan Manajemen Industri Kecil dan Menengah	
306	XX	15.09	Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil Menengah	
306	XX	16	Program Penataan Struktur Industri	
306	XX	16.01	Penyusunan DED infrastruktur dasar / fasilitas kawasan industri	
306	XX	16.02	Promosi Kawasan Industri	
306	XX	16.03	FS dan DED Reservoir Air Baku Kabupaten Siak	
306	XX	16.04	Perencanaan Kawasan Industri	
306	XX	16.05	Penyusunan DED Infrastruktur Air dan Pemukiman Kawasan Industri	
307			Transmigrasi	
307	XX	15	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi	
307	XX	15.01	Perencanaan pengembangan dan pembangunan permukiman transmigrasi	
307	XX	15.02	Perencanaan Pengembangan Rencana Satuan Kawasan Pemukiman (RSKP)	
307	XX	16	Program Penyiapan, Pendataan dan informasi ketransmigrasian	
307	XX	16.07	Pelatihan pemberdayaan masyarakat transmigrasi	
307	XX	16.08	Pendataan Transmigrasi di Kabupaten Siak	
307	XX	16.09	Pembinaan dan Pembangunan Daerah Transmigrasi	
307	XX	16.10	Pembinaan, Sosialisasi dan Penyuluhan Program Transmigrasi	
307	XX	16.11	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	
401			Perencanaan	
401	XX	18	Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
401	XX	18.05	Koordinasi pengembangan wilayah strategis	
401	XX	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
401	XX	21.01	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik	
401	XX	21.08	Penyusunan rancangan RKPD	
401	XX	21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	
401	XX	21.11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
401	XX	21.12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	
401	XX	21.15	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafoan Anggaran Sementara (PPAS)	
401	XX	21.16	Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	
401	XX	21.17	Publikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	
401	XX	21.18	Pengendalian dan Evaluasi RPJMD	
401	XX	21.19	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dokumen Perencanaan	
401	XX	21.20	Musrenbang RPJMD	
401	XX	21.21	Revisi RPJMD	
401	XX	21.22	Rancangan Teknokratik RPJMD tahun 2021-2026	
401	XX	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	
401	XX	22.02	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	
401	XX	22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	
401	XX	22.08	Monitoring Perencanaan Pembangunan bidang ekonomi dan keuangan	
401	XX	22.09	Kordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten siak	
401	XX	22.13	Survey perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan keuangan	
401	XX	23	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	
401	XX	23.04	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang air minum	
401	XX	23.05	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah	
401	XX	23.09	Survey perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah	
401	XX	23.10	Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah	
401	XX	26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	

1			2	3
401	XX	26.01	Kordinasi penyusunan aksi PPK kabupaten siak	
401	XX	26.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang pembangunan manusia dan masyarakat	
401	XX	26.03	Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Deveploment Goals (SDG`s) di Kabupaten Siak	
401	XX	26.04	Survey perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	
401	XX	26.05	Monitoring Perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat	
401	XX	27	Program perencanaan pembangunan bidang sosial	
401	XX	27.01	Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang Sosial	
401	XX	27.02	Survey Perencanaan pembangunan Bidang Sosial	
401	XX	27.03	Monitoring perencanaan pembangunan Bidang Sosial	
401	XX	27.04	Basis data pembangunan bidang sosial	
401	XX	27.05	Koordinasi dan Harmonisasi Percepatan Perencanaan Pembangunan Kampung	
402			Keuangan	
402	XX	15	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
402	XX	15.01	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	
402	XX	15.02	Penyusunan pelaporan penagihan piutang daerah	
402	XX	16	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
402	XX	16.01	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	
402	XX	16.02	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	
402	XX	16.03	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	
402	XX	16.04	Penyusunan rancangan peraturah KDH tentang penjabaran perubahan APBD	
402	XX	16.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	
402	XX	16.06	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	
402	XX	16.07	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	
402	XX	16.08	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	
402	XX	16.09	Peningkatan manajemen investasi	
402	XX	16.10	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pendataan pajak dan retribusi daerah)	
402	XX	16.11	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (penagihan pajak dan retribusi daerah)	
402	XX	16.12	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pendataan OP/SP PBB baru)	
402	XX	16.13	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Verifikasi data OP/SP PBB P2)	
402	XX	16.14	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pengelolaan data PBB P2 kab. siak)	
402	XX	16.15	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (penagihan PBB P2 dan BPHTB kab. siak)	
402	XX	16.16	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	
402	XX	16.17	Penyusunan laporan barang milik daerah	
402	XX	16.18	Pengendalian, evaluasi pemanfaatan barang daerah dan hasil pengadaan	
402	XX	16.19	Pengamanan aset pemerintah kab. Siak	
402	XX	16.20	Peningkatan manajemen aset/barang daerah (perencanaan kebutuhan)	
402	XX	16.21	Sosialisasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	
402	XX	16.22	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (penerimaan daerah)	
402	XX	16.23	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan belanja bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan	
402	XX	16.24	Penyusunan revisi kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten Siak	
402	XX	16.25	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan (Pekan Panutan Penarikan Undian PBB)	
402	XX	16.26	Sensus barang milik daerah	
402	XX	16.27	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
402	XX	16.28	Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah	
402	XX	16.29	Asistensi implementasi sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah	
402	XX	16.30	Bimbingan teknis pengelolaan gaji PNSD	
402	XX	16.31	Bimbingan teknis optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten siak	
402	XX	16.32	Pengelolaan Administrasi Gaji ASN	
402	XX	16.33	Penyusunan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak	
402	XX	16.34	Peningkatan sarana dan prasarana informasi pajak daerah	

1			2	3
402	XX	16.35	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah	
402	XX	16.36	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penertiban Pajak Daerah)	
402	XX	16.37	Penyusunan Peraturan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	
402	XX	16.38	Pengembangan Sistem Informasi Daerah Manajemen Pajak Daerah	
402	XX	16.39	Penyusunan Pelaporan Realisasi Belanja APBD	
402	XX	16.40	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan (Pemeriksaan, Keberatan)	
402	XX	16.41	Implementasi Aplikasi SIAP BMD	
402	XX	16.42	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Pekan panutan penarikan undian pbb)	
402	XX	16.43	Intensifikasi dan Ekstensivikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Penagihan dan Penyampaian PBB P2 Kab Siak)	
402	XX	16.44	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	
402	XX	16.45	Penyusunan Laporan DAK Non Fisik/Fisik dan PNBP	
402	XX	16.46	Penyusunan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	
403			Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	
403	XX	15	Program Pengembangan Karir Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	15.01	Pengelolaan penilaian kompetensi dan potensi Pejabat Struktural	
403	XX	15.02	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	
403	XX	15.03	Penataan Jabatan Pegawai ASN	
403	XX	15.04	Seleksi penerimaan calon Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	15.05	Analisis formasi kebutuhan Pegawai	
403	XX	15.06	Pelaksanaan pola karier Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	15.06	Pemberian Penghargaan bagi Pegawai ASN yang Berprestasi	
403	XX	16	Program Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	16.02	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai ASN	
403	XX	16.03	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai ASN	
403	XX	16.04	Pemantauan dan Pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	16.05	Pembinaan Mental dan Fisik Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	16.06	Pelaksanaan sumpah/janji Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	16.07	Penyelenggaraan SKJ Pegawai	
403	XX	16.08	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	
403	XX	16.09	Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai ASN Yang Berprestasi	
403	XX	17	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	
403	XX	17.01	Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai ASN	
403	XX	17.02	Penataan Sistem Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian	
403	XX	17.03	Pengelolaan data dan informasi kepegawaian	
403	XX	17.04	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	
403	XX	18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	18.01	Peningkatan keterampilan dan profesionalime	
403	XX	18.02	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pegawai ASN	
403	XX	18.03	Pendidikan & Pelatihan Fungsional bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	18.04	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	
403	XX	18.05	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	
403	XX	18.06	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	
403	XX	18.07	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	
403	XX	18.08	Pelaksanaan tugas belajar dan ikatan dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	18.09	Pelaksanaan Bimbingan dan Ujian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	
403	XX	18.10	Pengelolaan penilaian kompetensi dan potensi Pejabat Struktural	
404			Penelitian dan Pengembangan	
404	XX	15	Program kerjasama pembangunan	
404	XX	15.01	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara	
404	XX	15.02	Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	
404	XX	16	Program pengembangan data/informasi	
404	XX	16.01	Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah	
404	XX	16.02	Upgrade Aplikasi E-planing Kabupaten Siak	
404	XX	16.03	Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD)	
404	XX	17	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
404	XX	17.01	Kajian, Perencanaan, Pengembangan Daerah	
405			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

1			2	3
405	XX	18	Program penyelenggaraan penanggulangan bencana	
405	XX	18.02	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana	
405	XX	18.03	Pengelolaan manajemen operasional PUSDALOPS	
405	XX	18.04	Kegiatan Manajemen Kedaruratan dan Logistik	
405	XX	18.05	Tanggap Darurat Daerah Terkena Bencana	
405	XX	20	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	
405	XX	20.05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	
405	XX	20.07	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	
405	XX	20.08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	
405	XX	20.09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	
405	XX	20.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	
405	XX	20.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	
405	XX	20.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
405	XX	20.15	HUT Damkar/rakornas Damkar	
405	XX	20.16	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	
405	XX	21	Program penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi	
405	XX	21.01	Pelatihan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	
405	XX	21.02	Kegiatan Penilaian Kerusakan dan Kerugian sosial Ekonomi Pasca Bencana	
405	XX	22	Program pencegahan dini dan mitigasi bencana	
405	XX	22.03	Pelatihan penanggulangan bencana berbasis pemberdayaan masyarakat (relawan	
405	XX	22.04	Kegiatan Bulan Peringatan Pengurangan Resiko Bencana	
405	XX	22.05	Kegiatan Pembuatan canal bloking, tebat parit dan embung	
405	XX	22.06	Kegiatan Pembuatan reservoir	
405	XX	22.07	Desa siaga/tanggguh bencana	
405	XX	22.08	Kegiatan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kesiapsiagaan	
405	XX	22.09	Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	
405	XX	22.11	Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	
406			Kesatuan Bangsa dan Politik	
406	XX	15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	
406	XX	15.01	Penyiapan tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	
406	XX	15.09	Operasional komunitas intelijen daerah	
406	XX	15.11	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	
406	XX	15.12	Pelatihan Pemantapan Tugas Intelijen Daerah	
406	XX	15.13	Bimtek Kewaspadaan Dini Masyarakat Terhadap Gangguan Konflik Bagi Aparatur dan Masyarakat	
406	XX	15.14	Pelatihan Pencegahan Unjuk Rasa dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat	
406	XX	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
406	XX	17.10	Pelatihan dasar bela negara	
406	XX	17.11	Upacara Hari Bela Negara	
406	XX	17.12	Sosialisasi Peningkatan Rasa solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	
406	XX	17.13	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	
406	XX	17.14	Sosialisasi Nilai Kebangsaan	
406	XX	17.15	Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	
406	XX	17.16	Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	
406	XX	17.17	Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda di Kabupaten Siak	
406	XX	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	
406	XX	21.03	Koordinasi forum -forum diskusi politik	
406	XX	21.05	Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kab.Siak	
406	XX	21.06	Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Politik Kepada Masyarakat	
406	XX	21.07	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	
406	XX	21.08	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik	
406	XX	21.09	Bimtek dan Mekanisme Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik	
406	XX	21.10	Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Ormas Kepada Masyarakat	
406	XX	21.11	Monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	

1			2	3
5			FUNGSI PENDUKUNG	
503			Sekretariat Daerah	
503	XX	15	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	
503	XX	15.05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah	
503	XX	15.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	
503	XX	15.07	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	
503	XX	15.08	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah (APKASI)	
503	XX	15.09	Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
503	XX	15.10	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	
503	XX	15.11	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	
503	XX	16	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan	
503	XX	16.01	Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman/Juknis Pelaksanaan Kegiatan APBD	
503	XX	16.02	Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan Kegiatan APBD	
503	XX	17	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	
503	XX	17.06	Fasilitasi Pembentukan UPTD/UPTB	
503	XX	17.07	Fasilitasi Penyusunan Perangkat Daerah (kegiatan baru)	
503	XX	17.08	Evaluasi Pemetaan Urusan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 (kegiatan baru)	
503	XX	17.09	Penyusunan Profil Perangkat Daerah (kegiatan baru)	
503	XX	17.10	Rakor Kelembagaan	
503	XX	18	Program peningkatan kualitas kelembagaan	
503	XX	18.08	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
503	XX	18.09	Fasilitasi penyusunan ANJAB dan ABK	
503	XX	18.10	Rakor Kelembagaan	
503	XX	18.11	Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	
503	XX	18.12	Survey Kepuasan Masyarakat	
503	XX	18.13	Rapat Koordinasi dan Orientasi Lembaga Pemuda	
503	XX	18.14	Penyusunan Evaluasi Jabatan	
503	XX	18.15	Fasilitasi dan Pembinaan Penilaian Kinerja Individu (Kegiatan baru)	
503	XX	18.16	Fasilitasi Pembinaan Revolusi mental	
503	XX	18.17	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 (Kegiatan baru)	
503	XX	20	Program Sosialisasi Hukum Daerah	
503	XX	20.01	Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak	
503	XX	20.02	Penyuluhan Hukum Terpadu Tentang Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
503	XX	21	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
503	XX	21.02	Penyusunan Peraturan Daerah	
503	XX	21.05	Publikasi peraturan perundang-undangan	
503	XX	21.06	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	
503	XX	22	Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur	
503	XX	22.01	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	
503	XX	22.02	Monitoring dan Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	
503	XX	22.03	Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	
503	XX	23	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	
503	XX	23.03	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	
503	XX	23.04	Forum Kerjasama Antar BUMD/Perusahaan Daerah Kab.Siak	
503	XX	23.05	Workshop Pembinaan Badan Usaha Milik Negara	
503	XX	24	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	
503	XX	24.06	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	
503	XX	24.07	Pelaksanaan Kompetisi SINOVIK	
503	XX	24.08	Pengelolaan Sistem LAPOR/SP4N	
503	XX	24.09	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintah (Bed Nama)	
503	XX	24.10	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	
503	XX	24.11	Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	
503	XX	24.12	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	
503	XX	25	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama	
503	XX	25.04	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	
503	XX	25.05	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	

1	2		3
503	XX	25.06	Pelaksanaan Ibadah Haji & Umroh oleh Pemerintah Kabupaten Siak
503	XX	25.09	Safari Jum'at Pemerintah Kabupaten Siak
503	XX	25.10	Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak
503	XX	25.11	Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS) Kabupaten Siak
503	XX	26	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama
503	XX	26.02	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak
503	XX	26.03	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Riau
503	XX	26.04	Pelaksanaan Manasik Haji Kabupaten Siak
503	XX	26.05	Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Kutub (MQK)
503	XX	26.06	Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Kutub (MQK) Tingkat Provinsi Riau
503	XX	26.07	Pelaksanaan Festival anak Sholeh Tingkat Kabupaten Siak
503	XX	26.08	Pengiriman Keikutsertaan Kafilah Kabupaten Siak pada Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Provinsi Riau
503	XX	26.09	Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak
503	XX	26.10	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak
503	XX	26.11	Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
503	XX	27	Program Batas Wilayah Pemerintahan
503	XX	27.01	Pelacakan dan Pengukuran Batas Antar Kecamatan dan Kabupaten/Kota
503	XX	27.02	Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak
503	XX	27.03	Penegasan batas Wilayah Antar Kabupaten
503	XX	27.04	Identifikasi, Inventarisasi Nama Unsur Toponimi di Kab. Siak
503	XX	27.05	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak
503	XX	28	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
503	XX	28.15	Penyelesaian Masalah Proses Pengadaan Barang dan Jasa
503	XX	29	Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian
503	XX	29.01	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi
503	XX	29.02	Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi
503	XX	29.03	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan
503	XX	29.04	Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
503	XX	30	Program Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
503	XX	30.01	Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak
503	XX	31	Program kerjasama informasi dengan Mass Media
503	XX	31.08	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid
503	XX	31.09	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya
503	XX	31.10	Ivent - Ivent Kehumasan
503	XX	32	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan
503	XX	32.01	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD
503	XX	33	Program Jaminan Sosial
503	XX	33.01	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin
503	XX	33.02	Koordinasi dan Evaluasi Raskin
503	XX	34	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
503	XX	34.01	Penyusunan standar satuan harga
503	XX	34.02	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah
503	XX	34.03	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sison TEPRA
503	XX	34.04	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi
503	XX	34.05	Tata Kelola Administrasi Pemilihan Umum (Desk Pilkada)
503	XX	37	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
503	XX	37.02	Penyusunan standar satuan harga
503	XX	37.46	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan
503	XX	37.47	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah
503	XX	37.50	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sison TEPRA
504			Sekretariat DPRD

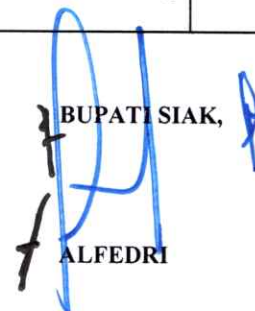
1			2	3
504	XX	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	
504	XX	15.01	Pembahasan Rancangan PERDA	
504	XX	15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	
504	XX	15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	
504	XX	15.04	Rapat Rapat Paripurna	
504	XX	15.05	Kegiatan Reses	
504	XX	15.06	kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	
504	XX	15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	
504	XX	15.10	Badan legislasi DPRD Kabupaten Siak	
504	XX	15.11	Pelaksanaan Tugas-tugas Keprotokoleraan DPRD Kabupaten Siak	
505			Inspektorat	
505	XX	15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
505	XX	15.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (PKTP)	
505	XX	15.02	Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung	
505	XX	15.03	Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman/Juknis pelaksanaan Standar Prosedur Pengawasan	
505	XX	15.04	Kerja sama Pengawasan Internal (Join Audit)	
505	XX	16	Program Peningkatan Kepatuhan Penyelesaian Tindak Lanjut	
505	XX	16.01	Inventarisasi temuan hasil pengawasan (Gelar Pengawasan Daerah)	
505	XX	16.02	Monitoring Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	
505	XX	16.03	Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	
505	XX	17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	
505	XX	17.01	Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	

1		2		3
505	XX	17.02	Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan SPIP	
505	XX	17.03	Laporan Pajak-Pajak Pegawai (LP2P)	
505	XX	18	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
505	XX	18.01	Evaluasi Atas Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	
505	XX	18.02	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
505	XX	18.03	Review Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Kab. Siak	
505	XX	18.04	Review Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang Jasa dan Realisasi Dana Kampung	
505	XX	19	Program Penanganan Kasus Pengaduan	
505	XX	19.01	Penanganan Kasus Perselisihan Perkawinan ASN	
505	XX	19.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Kab. Siak	
505	XX	19.03	Sistem Penanganan Layanan Pengaduan Berbasis IT	
505	XX	19.04	Penyediaan Layanan Pemeriksaan Berbasis IT	
505	XX	20	Program Pencegahan Korupsi	
505	XX	20.01	Pembinaan Integritas Aparatur	
505	XX	20.02	Optimalisasi Pencegahan Korupsi	
505	XX	22	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
505	XX	22.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
505	XX	22.02	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu	
506			Sekretariat KORPRI	
506	XX	15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
506	XX	15.01	KORPRI Peduli pada anggota KORPRI dan Masyarakat	
506	XX	15.02	Sarasehan wawasan kebangsaan dan pemantapan jiwa korsa korpri	
506	XX	15.03	Pelatihan anggota KORPRI pra purna tugas	
506	XX	17	Program Fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI	
506	XX	17.01	HUT KORPRI	
506	XX	17.02	Partisipasi KORPRI Kabupaten Siak pada Event-event Tingkat Provinsi/Nasional	
506	XX	17.03	Koordinasi LKBH Kabupaten Siak	
506	XX	17.04	Halal Bi Halal dan Pelepasan Jemaah Haji Anggota KORPRI	
506	XX	17.05	Persemayaman dan pemakaman anggota KORPRI yang meninggal Dunia	
506	XX	17.06	Pembinaan Agenda Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak	
506	XX	17.07	KORPRI Peduli pada anggota KORPRI dan Masyarakat	
506	XX	17.08	Sarasehan wawasan kebangsaan dan pemantapan jiwa korsa korpri	
506	XX	17.09	Pelatihan anggota KORPRI Pra Purna Tugas	
507			Kecamatan	
507	XX	31	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan	
507	XX	31.01	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	
507	XX	31.02	Musabaqah Tilawatil Quran Kecamatan (MTQ kecamatan)	
507	XX	31.03	Festival Anak Sholeh (FASI)	
507	XX	31.04	Event Siak Bermadah	
507	XX	31.05	Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Siak (MTQ Kabupaten Siak)	
507	XX	31.06	Pekan Olah Raga Kabupaten (PORKAB)	
507	XX	31.07	Olimpiade Olah Rag Siswa Nasional (O2SN)	
507	XX	31.08	Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)	
507	XX	31.09	Pekan Olah Raga Pelajar daera (POPDA)	
507	XX	31.10	Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	
507	XX	31.11	Musabaqah Tilawatil Quran Kelurahan (MTQ Kelurahan)	
507	XX	31.12	Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan	
507	XX	31.13	Penanaman Perdana Benih Padi (Turun Bumi)	
507	XX	31.14	Petang Megang (Ramadhan)	
507	XX	31.15	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	
507	XX	31.16	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi	
507	XX	31.17	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	
507	XX	31.18	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	
507	XX	31.19	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
507	XX	31.20	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
507	XX	31.21	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	
507	XX	31.22	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	

1			2	3
507	XX	31.23	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kampung Rempak	
507	XX	31.24	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Kampung Rempak	
507	XX	31.25	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kampung Rempak	
507	XX	31.26	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Kampung Rempak	
507	XX	31.27	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Kampung Rempak	
507	XX	31.28	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kampung Rempak	
507	XX	31.29	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kampung Rempak	
507	XX	31.30	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Minas Jaya	
507	XX	31.31	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Minas Jaya	
507	XX	31.32	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Minas Jaya	
507	XX	31.33	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Minas Jaya	
507	XX	31.34	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Minas Jaya	
507	XX	31.35	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Minas Jaya	
507	XX	31.36	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Minas Jaya	
507	XX	31.37	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Sungai Mempura	
507	XX	31.38	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Sungai Mempura	
507	XX	31.39	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Sungai Mempura	
507	XX	31.40	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Sungai Mempura	
507	XX	31.41	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Sungai Mempura	
507	XX	31.42	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Sungai Mempura	
507	XX	31.43	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Sungai Mempura	
507	XX	31.44	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Sungai Apit	
507	XX	31.45	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Sungai Apit	
507	XX	31.46	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Sungai Apit	
507	XX	31.47	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Sungai Apit	
507	XX	31.48	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Sungai Apit	
507	XX	31.49	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Sungai Apit	
507	XX	31.50	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Sungai Apit	
507	XX	31.51	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Perawang	
507	XX	31.52	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Perawang	
507	XX	31.53	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Perawang	
507	XX	31.54	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Perawang	
507	XX	31.55	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Perawang	
507	XX	31.56	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Perawang	
507	XX	31.57	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Perawang	
507	XX	31.58	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Simpang Belutu	

1			2	3
507	XX	31.59	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Simpang Belutu	
507	XX	31.60	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Simpang Belutu	
507	XX	31.61	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Simpang Belutu	
507	XX	31.62	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Simpang Belutu	
507	XX	31.63	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Simpang Belutu	
507	XX	31.64	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Simpang Belutu	
507	XX	31.65	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Telaga Sam-Sam	
507	XX	31.66	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Telaga Sam-Sam	
507	XX	31.67	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Telaga Sam-Sam	
507	XX	31.68	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Telaga Sam-Sam	
507	XX	31.69	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Telaga Sam-Sam	
507	XX	31.70	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Telaga Sam-Sam	
507	XX	31.71	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Telaga Sam-Sam	
507	XX	31.72	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kandis Kota	
507	XX	31.73	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Kandis Kota	
507	XX	31.74	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kandis Kota	
507	XX	31.75	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Kandis Kota	
507	XX	31.76	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Kandis Kota	
507	XX	31.77	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kandis Kota	
507	XX	31.78	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kandis Kota	
507	XX	31.101	Tour De Sawah (TDS)	Perubahan
507	XX	31.102	Pacu Gerandong	Perubahan
507	XX	31.103	Sepak Bola Sawah	Perubahan
507	XX	31.104	Festival Layang - layang Tradisional	Perubahan
507	XX	31.105	Pacu Hand Traktor	Perubahan
507	XX	31.106	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Simpang Belutu	Perubahan
507	XX	31.107	Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kelurahan Simpang Belutu	Perubahan
507	XX	31.108	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya Kelurahan Simpang Belutu	Perubahan
507	XX	31.109	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Telaga Sam Sam	Perubahan
507	XX	31.110	Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kelurahan Telaga Sam Sam	Perubahan
507	XX	31.111	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya Kelurahan Telaga Sam Sam	Perubahan
507	XX	31.112	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Kandis Kota	Perubahan
507	XX	31.113	Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kelurahan Kandis Kota	Perubahan
507	XX	31.114	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya Kelurahan Kandis Kota	Perubahan
507	XX	31.115	Operasional Penanganan Covid19 di kelurahan Kampung Dalam	Perubahan
507	XX	31.116	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di kelurahan Kampung Dalam	Perubahan
507	XX	31.117	Operasional Penanganan Covid19 di kelurahan Kampung Rempak	Perubahan
507	XX	31.118	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di kelurahan Kampung Rempak	Perubahan
507	XX	31.119	Operasional Penanganan Covid19 di kelurahan Sungai Mempura	Perubahan
507	XX	31.120	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di kelurahan Sungai Mempura	Perubahan
507	XX	31.121	Operasional Penanganan Covid19 di kelurahan Sungai Apit	Perubahan

1			2	3
507	XX	31.122	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di kelurahan Sungai Apit	Perubahan
507	XX	31.123	Operasional Penanganan Covid19 di kelurahan Minas Jaya	Perubahan
507	XX	31.124	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di kelurahan Minas Jaya	Perubahan
507	XX	31.125	Operasional Penanganan Covid19 di kelurahan Simpang Belutu	Perubahan
507	XX	31.126	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di kelurahan Simpang Belutu	Perubahan
507	XX	31.127	Operasional Penanganan Covid19 di kelurahan Telaga Sam-sam	Perubahan
507	XX	31.128	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di kelurahan Telaga Sam-sam	Perubahan
507	XX	31.129	Operasional Penanganan Covid19 di kelurahan Kandis Kota	Perubahan
507	XX	31.130	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di kelurahan Kandis Kota	Perubahan
507	XX	31.131	Operasional Penanganan Covid19 di kelurahan Perawang	Perubahan
507	XX	31.132	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid19 di kelurahan Perawang	Perubahan
507	XX	31.133	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	Perubahan
507	XX	31.134	Operasional Penanganan covid - 19 di kelurahan Kampung Dalam (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.135	Operasional Penanganan covid - 19 di kelurahan Kampung Rempak (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.136	Operasional Penanganan covid - 19 di kelurahan Sungai Mempura (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.137	Operasional Penanganan covid - 19 di kelurahan Sungai Apit (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.138	Operasional Penanganan covid - 19 di kelurahan Minas Jaya (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.139	Operasional Penanganan covid - 19 di kelurahan Simpang Belutu (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.140	Operasional Penanganan covid - 19 di kelurahan Telaga Sam-sam (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.141	Operasional Penanganan covid - 19 di kelurahan Kandis Kota (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.142	Operasional Penanganan covid - 19 di kelurahan Perawang (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.143	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid - 19 di Kelurahan Sungai Mempura (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.144	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid - 19 di Kelurahan Sungai Apit (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.145	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid - 19 di Kelurahan Simpang Belutu (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.146	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid - 19 di Kelurahan Telaga Sam - sam (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.147	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid - 19 di Kelurahan Kandis Kota (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan
507	XX	31.148	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Covid - 19 di Kelurahan Perawang (Bantuan Keuangan Provinsi Riau)	Perubahan


 BUPATI SIAK,
 ALFEDRI

**DAFTAR KODE AKUN APBD
 KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	
4.1.1.01	Pajak Hotel	
4.1.1.01.01	Hotel Bintang Lima Berlian	
4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima	
4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	
4.1.1.01.07	box	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	
4.1.1.01.10	Motel	
4.1.1.01.11	Cottage	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata	
4.1.1.01.14	Gubuk Pariwisata	
4.1.1.02	Pajak Restoran	
4.1.1.02.01	Restoran	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	
4.1.1.02.03	Kafetaria	
4.1.1.02.04	Kantin	
4.1.1.02.05	Katering	
4.1.1.02.06	Warung	
4.1.1.02.06	Warung	
4.1.1.02.07	Bar	
4.1.1.02.08	Jasa Boga	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	
4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan	
4.1.1.03.04	Kontes Binaraga	
4.1.1.03.05	Pameran	
4.1.1.03.06	Diskotik	
4.1.1.03.07	Karaoke	
4.1.1.03.08	Klub Malam	
4.1.1.03.09	Sirkus/akrobat/sulap	
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	
4.1.1.03.11	Permainan Golf	
4.1.1.03.12	Permainan Bowling	
4.1.1.03.13	Pacuan Kuda	
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	
4.1.1.03.17	Mandi Uap/spa	
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	
4.1.1.04	Pajak Reklame	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/videotron/ megatron	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/stiker	
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	
4.1.1.04.06	Reklame Udara	

1	2	3
4.1.1.04.07	Reklame Apung	
4.1.1.04.08	Reklame Suara	
4.1.1.04.09	Reklame Film/slide	
4.1.1.04.10	Reklame Peragaan	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	
4.1.1.06	Pajak Parkir	
4.1.1.06.01	Pajak Parkir	
4.1.1.07	Pajak Air Tanah	
4.1.1.07.01	Pajak Air Tanah	
4.1.1.08	Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.1.08.01	Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.1.09	Pajak Lingkungan	
4.1.1.09.01	Pajak Lingkungan	
4.1.1.10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.1.10.01	Asbes	
4.1.1.10.02	Batu Tulis	
4.1.1.10.03	Batu Setengah Permata	
4.1.1.10.04	Batu Kapur	
4.1.1.10.05	Batu Apung	
4.1.1.10.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.1.11.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
4.1.2.01.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan	
4.1.2.01.11	Retribusi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	
4.1.2.01.12	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
4.1.2.01.13	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	
4.1.2.01.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
4.1.2.01.15	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	
4.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Di hapus)	
4.1.2.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	
4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
4.1.2.02.10	Retribusi Penyebrangan di air	
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4.1.2.02.11	Retribusi Penyebrangan di air	
4.1.2.02.12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Di hapus)	

1	2	3
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	
4.1.2.03.06	Retribusi Izin Peruntukan Tanah	
4.1.2.03.07	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
4.1.2.03.08	Retribusi Izin Pengusahaan Penangkaran Sarung Burung Walet	
4.1.2.03.09	Retribusi di Bidang Perdagangan (SIUP/TDG/TDP)	
4.1.2.03.10	Retribusi Tenaga Kerja Asing	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
4.1.3.01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah	
4.1.3.01.02	BUMD	
4.1.3.02	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
4.1.3.02.01	BUMN	
4.1.3.03	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	
4.1.3.03.01	Perusahaan Patungan	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah	
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	
4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	
4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	
4.1.4.01.09	Penjualan Lampu Hias Bekas	
4.1.4.01.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	
4.1.4.01.11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas	
4.1.4.01.12	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi	
4.1.4.01.13	Penjualan hasil pertanian	
4.1.4.01.14	Penjualan hasil kehutanan	
4.1.4.01.15	Penjualan hasil perkebunan	
4.1.4.01.16	Penjualan hasil peternakan	
4.1.4.01.17	Penjualan hasil perikanan	
4.1.4.01.18	Penjualan hasil sitaan	
4.1.4.01.19	Penjualan Hasil Bersih Lelang Aset Daerah	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	
4.1.4.02.03	Jasa Giro Dana Cadangan	
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	
4.1.4.04.02	Kerugian Barang	
4.1.4.05	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
4.1.4.05.01	Penerimaan Komisi dari penempatan Kas daerah	
4.1.4.05.02	Penerimaan Potongan	
4.1.4.05.03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
4.1.4.06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	
4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat	
4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang	

1	2	3
4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan	
4.1.4.06.07	Bidang Perhubungan	
4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup	
4.1.4.06.09	Bidang Pertanahan	
4.1.4.06.10	Bidang Pertanian	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Parkir	
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Di hapus)	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	
4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan (Di hapus)	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4.1.4.07.13	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1.4.09.02	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	
4.1.4.09.03	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman	
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	
4.1.4.10.01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	
4.1.4.10.02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan	
4.1.4.10.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	
4.1.4.10.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas	
4.1.4.10.05	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka	
4.1.4.10.06	Pendapatan atas pinjaman lunak	
4.1.4.10.07	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya	
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
4.1.4.11.01	Fasilitas Sosial	
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	
4.1.4.11.03	Sewa Aset Daerah	
4.1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
4.1.4.12.01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk	
4.1.4.12.02	Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan	
4.1.4.12.03	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas	
4.1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
4.1.4.13.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	
4.1.4.13.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan	
4.1.4.13.03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	
4.1.4.13.04	Bunga Pengembalian Angsuran Pinjaman Kredit PEK	
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4.1.4.14.1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	
4.1.4.15	Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya	
4.1.4.15.01	Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD RSUD	
4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD RSUD	
4.1.4.17	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP)	

1	2	3
4.1.4.17.01	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
4.1.4.18	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
4.1.4.18.01	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satdik Sekolah Dasar Negeri	
4.1.4.18.02	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satdik Sekolah Menengah Pertama Negeri	
4.1.4.19	Pendapatan BLUD Puskesmas	
4.1.4.19.01	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sungai Apit	
4.1.4.19.02	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas PKM Sabak Auh	
4.1.4.19.03	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Bunga Raya	
4.1.4.19.04	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Siak	
4.1.4.19.05	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Mempura	
4.1.4.19.06	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Dayun	
4.1.4.19.07	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas PKM Koto Gasib	
4.1.4.19.08	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Dalam	
4.1.4.19.09	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Kerinci Kanan	
4.1.4.19.10	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Perawang	
4.1.4.19.11	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sungai Mandau	
4.1.4.19.12	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Minas	
4.1.4.19.13	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Kandis	
4.1.4.19.14	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Tualang	
4.1.4.19.15	Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pusako	
42	Dana Perimbangan	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	
4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Di hapus)	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	Perubahan
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	
4.2.1.02.03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	
4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	
4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	
4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	
4.2.1.02.12	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	Perubahan
4.2.2	Dana Alokasi Umum	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	
4.2.3.01	Dana alokasi khusus	
4.2.3.01.01	Dana alokasi khusus	
4.2.3.01.02	Dana alokasi khusus fisik	
4.2.3.01.03	Dana alokasi khusus non fisik	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
4.3.1	Pendapatan Hibah	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
4.3.1.01.01	Pemerintah	

1	2	3
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya	
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah	
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	
4.3.1.03.01	Badan/lembaga/organisasi swasta	
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	
4.3.1.04.01	Kelompok masyarakat/perorangan	
4.3.1.05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah dari Bilateral	
4.3.1.05.02	Pendapatan Hibah dari Multilateral	
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya	
4.3.2	Dana Darurat	
4.3.2.01	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
4.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.02	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air	
4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	
4.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (Di hapus)	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
4.3.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
4.3.3.03.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
4.3.3.04	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
4.3.3.04.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	
4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian DAU	
4.3.4.01.02	Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan	
4.3.4.01.03	Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	
4.3.4.01.04	Dana Insentif Daerah	
4.3.4.01.05	Dana Desa	
4.3.4.02	Dana Otonomi Khusus	
4.3.4.02.01	Dana Otonomi Khusus	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	
4.3.5.02	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	
4.3.5.03	Bantuan Keuangan dari Kota	
4.3.5.03.01	Bantuan Keuangan Dari Kota	
4.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya	
4.3.6.01	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya	
4.3.6.01.01	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya	

1	2	3
4.3.6.02	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
4.3.6.02.01	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satdik SDN	
4.3.6.02.02	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satdik SMPN	
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
5.1.1	Belanja Pegawai	
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	
5.1.1.01.09	Iuran BPJS Kesehatan	
5.1.1.01.10	Uang Paket	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	
5.1.1.01.19	Tunjangan Daerah Terpencil	
5.1.1.01.20	Tunjangan Kesehatan DPRD	
5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja	
5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Kematian	
5.1.1.01.23	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru PNSD	
5.1.1.01.25	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	
5.1.1.01.26	Tunjangan Khusus Guru	
5.1.1.01.27	Tunjangan Reses	
5.1.1.01.28	Tunjangan Transportasi	
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	
5.1.1.02.02	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	
5.1.1.02.03	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja	
5.1.1.02.04	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	
5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5.1.1.03.02	Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB	
5.1.1.04.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Di hapus/kodering tidak dipakai lagi)	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5.1.1.07	Tambahan Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
5.1.1.07.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	
5.1.1.08	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	
5.1.1.08.01	Insentif Pemungutan Pajak Reklame	
5.1.1.08.02	Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah	
5.1.1.08.03	Insentif Pemungutan Pajak Bumi Bangunan	
5.1.1.08.04	Insentif Pemungutan Pajak Hotel	
5.1.1.08.05	Insentif Pemungutan Pajak Restoran	

1	2	3
5.1.1.08.06	Insentif Pemungutan Pajak Hiburan	
5.1.1.08.07	Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	
5.1.1.08.08	Insentif Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	
5.1.1.08.09	Insentif Pemungutan Pajak Parkir	
5.1.1.08.10	Insentif Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	
5.1.1.08.11	Insentif Pemungutan BPHTB	
5.1.1.08.12	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	
5.1.1.08.13	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	
5.1.1.08.14	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Perijinan Tertentu	
5.1.2	Belanja Bunga	
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5.1.2.01.02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
5.1.2.02	Bunga Utang Obligasi	
5.1.2.02.01	Bunga Utang Obligasi	
5.1.3	Belanja Subsidi	
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	
5.1.3.01.02	Belanja Subsidi kepada Lembaga	
5.1.4	Belanja Hibah	
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	
5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	
5.1.4.01.02	Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)	
5.1.4.01.03	Belanja Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum	
5.1.4.01.04	Belanja Hibah Kepada Tentara Manunggal Membangun Desa	
5.1.4.01.05	Belanja Hibah Kepada Kepolisian Resor	
5.1.4.01.06	Belanja Hibah Kepada Komando Distrik Militer	Perubahan
5.1.4.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5.1.4.02.01	Pemerintah Provinsi	
5.1.4.02.02	Pemerintah Kabupaten/Kota	
5.1.4.03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah	
5.1.4.03.01	Perusahaan Daerah	
5.1.4.04	Belanja Hibah kepada Masyarakat	
5.1.4.04.01	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Siak	
5.1.4.04.02	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sei Apit	
5.1.4.04.03	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Minas	
5.1.4.04.04	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Kandis	
5.1.4.04.05	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Tualang	
5.1.4.04.06	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Dayun	
5.1.4.04.07	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Bunga Raya	
5.1.4.04.08	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Koto Gasib	
5.1.4.04.09	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sungai Mandau	
5.1.4.04.10	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Lubuk Dalam	
5.1.4.04.11	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Kerinci Kanan	
5.1.4.04.12	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Sabak Auh	
5.1.4.04.13	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Pusako	
5.1.4.04.14	Belanja Hibah kepada Masjid di Kecamatan Mempura	
5.1.4.04.15	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Siak	
5.1.4.04.16	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Sungai Apit	
5.1.4.04.17	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Minas	
5.1.4.04.18	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Dayun	
5.1.4.04.19	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Kerinci Kanan	
5.1.4.04.20	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Bunga Raya	

1	2	3
5.1.4.04.21	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Sungai Mandau	
5.1.4.04.22	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Kandis	
5.1.4.04.23	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Koto Gasib	
5.1.4.04.24	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Lubuk Dalam	
5.1.4.04.25	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Sabak Auh	
5.1.4.04.26	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Mempura	
5.1.4.04.27	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Pusako	
5.1.4.04.28	Spesific Grant Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan Masyarat Pedesaan bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) se Kecamatan Tualang	
5.1.4.04.29	Penghargaan kepada Pokmas - Pokmas yang Berprestasi dalam pelaksanaan Spesific Grant	
5.1.4.04.30	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Minas	
5.1.4.04.31	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Siak	
5.1.4.04.32	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Sungai Apit	
5.1.4.04.33	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Tualang	
5.1.4.04.34	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Kandis	
5.1.4.04.35	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Madrasah Negeri	
5.1.4.04.36	Belanja Hibah kepada Rombongan Belajar (Rombel) Sekolah Swasta Kelurahan Di Kecamatan Mempura	
5.1.4.04.37	Belanja Hibah Kepada Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)	
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	
5.1.4.05.01	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	
5.1.4.05.02	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan	
5.1.4.05.03	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kepemudaan, Budaya, Kesenian dan Olahraga	
5.1.4.05.04	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan	
5.1.4.05.05	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Ekonomi dan Sosial	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Terencana	
5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Tidak Terencana	
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga non Pemerintah	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga non Pemerintah	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
5.1.6.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	
5.1.6.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi	
5.1.6.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.04.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintahan Desa dan Partai Politik	

1	2	3
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota	
5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya	
5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PAN	
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PDI-P	
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar	
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	
5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PKS	
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PPP	
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PKB	
5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PDS	
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PBB	
5.1.7.05.11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra	
5.1.7.05.12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PPRN	
5.1.7.05.13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura	
5.1.7.05.14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Buruh	
5.1.7.05.15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat (NasDem)	
5.1.7.05.16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	
5.2	BELANJA LANGSUNG	
5.2.1	Belanja Pegawai	
5.2.1.01	Honorarium PNS	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Peneliti Pelaksana Kontrak	
5.2.1.01.06	Honorarium Staf PPTK	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	
5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
5.2.1.03	Uang Lembur	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	
5.2.1.04	Belanja Pegawai Dana BOS	
5.2.1.04.01	Belanja Pegawai Dana BOS	
5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	
5.2.1.06	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	
5.2.1.06.01	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	

1	2	3
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	
5.2.2.01.04	Belanja perangko materai dan benda pos lainnya	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	
5.2.2.01.09	Belanja bahan habis pakai material kesehatan	
5.2.2.01.10	Belanja bahan habis pakai material laboratorium	
5.2.2.01.11	Belanja bahan habis pakai material besi	
5.2.2.01.12	Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit	
5.2.2.01.13	Belanja bahan habis pakai radiologi	
5.2.2.01.14	Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor	
5.2.2.01.15	Belanja bahan kelengkapan pertukangan	
5.2.2.01.16	Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin	
5.2.2.01.17	Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika	
5.2.2.01.18	Belanja bahan habis pakai radiologi	
5.2.2.01.19	Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan	
5.2.2.01.20	Belanja bahan pengharum ruangan	
5.2.2.01.21	Belanja bahan pelumas	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	
5.2.2.02.06	Belanja tas kegiatan	
5.2.2.02.07	Belanja bahan logistik rumah tangga	
5.2.2.02.08	Belanja Plakat, Souvenir dan Figura	
5.2.2.02.09	Belanja dekorasi	
5.2.2.02.10	Belanja dokumentasi	
5.2.2.02.11	Belanja bahan arsip dokumen	
5.2.2.02.12	Belanja kelengkapan olah raga	
5.2.2.02.13	Belanja bahan specimen	
5.2.2.02.14	Belanja bahan inseminasi buatan	
5.2.2.02.15	Belanja bahan pakan ternak	
5.2.2.02.17	Belanja bahan publikasi	
5.2.2.02.18	Belanja bahan makan ternak	
5.2.2.02.19	Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara	
5.2.2.02.20	Belanja bahan pupuk	
5.2.2.02.21	Belanja baju pasien	
5.2.2.02.22	Belanja bahan pestisida	
5.2.2.02.23	Belanja bahan citra satelit/foto udara	
5.2.2.02.24	Belanja Cetak Sawah	
5.2.2.02.25	Belanja Sarana Penunjang Perikanan	
5.2.2.02.25	Belanja Sarana Penunjang Perikanan	
5.2.2.02.26	Belanja Bahan Mendukung Pemanfaatan Bahan Bekas	
5.2.2.02.27	Belanja Pengadaan Tanah Timbun	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	
5.2.2.03.01	Belanja jasa telepon	
5.2.2.03.02	Belanja jasa air	
5.2.2.03.03	Belanja jasa listrik	
5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang / pemenang lelang	
5.2.2.03.05	Belanja berlangganan surat kabar / majalah	
5.2.2.03.06	Belanja jasa kawat / faksimili / internet	
5.2.2.03.07	Belanja jasa paket / pengiriman	
5.2.2.03.08	Belanja jasa sertifikasi	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	
5.2.2.03.10	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	
5.2.2.03.11	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi	
5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	
5.2.2.03.15	Belanja jasa perawatan kesehatan	
5.2.2.03.16	Belanja jasa administrasi pengolahan arsip SKPKD/KPKD	
5.2.2.03.17	Belanja jasa analisis di laboratorium	
5.2.2.03.18	Belanja jasa dekorasi	
5.2.2.03.19	Belanja jasa Administrasi Pimpinan/Ajudan	
5.2.2.03.20	Belanja jasa administrasi kantor/Administrasi Pengelola Keuangan/Operator Komputer/Outsourcing /Tenaga Lainnya	
5.2.2.03.21	Belanja jasa keamanan kantor	
5.2.2.03.22	Belanja jasa kebersihan kantor	

1	2	3
5.2.2.03.24	Belanja jasa Petugas Pertamanan, Pemakaman, Pasar, Listrik PLTD dan PJU	
5.2.2.03.25	Belanja jasa Petugas Pemadam Kebakaran	
5.2.2.03.26	Belanja jasa Pengurus Rumah Rehabilitasi	
5.2.2.03.27	Belanja jasa pelatih	
5.2.2.03.28	Belanja Jasa Tenaga Sistem Informasi/Teknis Informatika/Programmer/Aplikasi Komputer dan Komunikasi	
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	
5.2.2.03.31	Belanja Jasa penyuluh lapangan	
5.2.2.03.32	Belanja Jasa pendampingan keuangan desa	
5.2.2.03.33	Belanja Jasa Tenaga Teknis/Pendukung Unit Layanan Pengadaan (ULP)	
5.2.2.03.34	Belanja Jasa Penunjang Kegiatan/Operasional Program Kemasyarakatan	
5.2.2.03.35	Belanja Jasa Petugas Speed Boad Patroli, Kapal Ferry, Bus Air dan Tug Boat	
5.2.2.03.36	Belanja Jasa Petugas Siak TV dan Radio Penyiaran Kabupaten (RPK)	
5.2.2.03.37	Belanja Jasa Instruktur Senam	
5.2.2.03.38	Belanja Jasa Petugas Pelaksana UPTD SPAM	
5.2.2.03.39	Belanja Jasa Petugas Kebersihan, TPA (BHL), Peralatan dan Perbengkelan Alat Berat, Venue Olah Raga, Situs Peninggalan Bersejarah dan Objek Wisata	
5.2.2.03.40	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor/Tenaga Lainnya (SK Bupati Siak)	
5.2.2.03.41	Belanja Jasa Tenaga Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial	
5.2.2.03.42	Belanja Jasa Program Pemberdayaan Kampung (PPK)	
5.2.2.03.43	Belanja Uang Saku Peserta	
5.2.2.03.44	Belanja Transportasi Peserta	
5.2.2.03.45	Belanja Akomodasi Peserta	
5.2.2.03.46	Belanja Jasa Supir	
5.2.2.03.47	Belanja Jasa Petugas Operator Mesin	
5.2.2.03.48	Belanja Jasa Petugas Limbah	
5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kamar Jenazah	
5.2.2.03.50	Belanja Jasa Juru Masak	
5.2.2.03.51	Belanja Jasa Petugas Cuci	
5.2.2.03.52	Belanja Jasa Petugas Oksigen	
5.2.2.03.53	Belanja Jasa Petugas Pramusaji	
5.2.2.03.54	Belanja Jasa Petugas Teknisi Mesin	
5.2.2.03.55	Belanja Jasa Petugas Juru Pakarya	
5.2.2.03.56	Belanja Jasa Petugas BKOL	
5.2.2.03.57	Belanja Jasa Petugas Bank Sampah	
5.2.2.03.58	Belanja Jasa Petugas Publikasi	
5.2.2.03.59	Belanja Jasa Petugas Sensus	
5.2.2.03.60	Belanja Jasa Petugas Rumah Jabatan	
5.2.2.03.61	Belanja Jasa Petugas Teknis	
5.2.2.03.62	Belanja Jasa Petugas Listrik dan Air	
5.2.2.03.63	Belanja Jasa Petugas Operator Sound Sistem	
5.2.2.03.64	Belanja Jasa Petugas Jaga	
5.2.2.03.65	Belanja Jasa Tenaga Disabilitas	
5.2.2.04	Belanja Premi/Iuran Asuransi	
5.2.2.04.01	Belanja Premi/Iuran Asuransi Kesehatan	
5.2.2.04.02	Belanja Premi/Iuran Asuransi Barang Milik Daerah	
5.2.2.04.03	Belanja Premi/Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja Non PNS	
5.2.2.04.04	Belanja Premi/Iuran Asuransi Kesehatan Non PNS	
5.2.2.04.05	Belanja Premi/Iuran Asuransi Kematian Non PNS	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service kendaraan bermotor	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan bermotor	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas kendaraan bermotor	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR kendaraan bermotor	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	
5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	
5.2.2.05.07	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	
5.2.2.06.03	Belanja penjilidan	
5.2.2.06.04	Belanja layout dan typesetting	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	
5.2.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	

1	2	3
5.2.2.07.05	Belanja sewa tanah	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	
5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	
5.2.2.08.03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	
5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	
5.2.2.09.02	Belanja sewa Buldoser	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	
5.2.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer	
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	
5.2.2.10.08	Belanja sewa mesin peralatan kerja	
5.2.2.10.09	Belanja sewa GPS	
5.2.2.10.10	Belanja sewa Kompas	
5.2.2.10.11	Belanja sewa Mesin Bor	
5.2.2.10.12	Belanja sewa planimeter	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	
5.2.2.11.01	-	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
5.2.2.12.01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
5.2.2.12.06	Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	
5.2.2.13.02	Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	
5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI	
5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	
5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	
5.2.2.16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
5.2.2.16.01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	
5.2.2.16.02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah	
5.2.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai	
5.2.2.17.01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah	
5.2.2.17.02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah	
5.2.2.17.03	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	
5.2.2.18	Belanja Jasa Publikasi	
5.2.2.18.01	Belanja Jasa Publikasi Media Cetak	
5.2.2.18.02	Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual	
5.2.2.18.03	Belanja Jasa Publikasi Media Internet	
5.2.2.19	Belanja Jasa Kebersihan	
5.2.2.19.01	Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga	

1	2	3
5.2.2.19.02	Belanja Jasa Kebersihan Ruangan	
5.2.2.20	Belanja Jasa Keamanan	
5.2.2.20.01	Belanja Jasa Keamanan	
5.2.2.21	Belanja Pajak	
5.2.2.21.01	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	
5.2.2.22	Belanja Pemeliharaan	
5.2.2.22.02	Belanja Pemeliharaan Jalan	
5.2.2.22.03	Belanja Pemeliharaan Jembatan	
5.2.2.22.04	Belanja Pemeliharaan Sungai, Suak, Saluran Air dan Jaringan Pengairan	
5.2.2.22.05	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan	
5.2.2.22.06	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer/Internet	
5.2.2.22.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	
5.2.2.22.08	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
5.2.2.22.09	Belanja Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	
5.2.2.22.10	Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	
5.2.2.22.11	Belanja Pemeliharaan Taman/Ruang Terbuka Hijau	
5.2.2.22.12	Belanja Pemeliharaan Gedung Milik Pemerintah	
5.2.2.22.13	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum	
5.2.2.22.14	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Air Limbah	
5.2.2.22.15	Belanja Pemeliharaan Infrastruktur Lingkungan	
5.2.2.22.16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Listrik	
5.2.2.22.17	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan	
5.2.2.22.18	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	
5.2.2.22.19	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	
5.2.2.22.20	Belanja Pemeliharaan Tower	
5.2.2.22.21	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	
5.2.2.22.22	Belanja Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi	
5.2.2.22.23	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Informasi Pajak Daerah	
5.2.2.22.24	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Logistik	
5.2.2.22.25	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan	
5.2.2.22.26	Pemeliharaan Peralatan Keamanan Persandian	
5.2.2.22.27	Pemeliharaan Stadion	
5.2.2.23	Belanja Jasa Konsultansi	
5.2.2.23.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	
5.2.2.23.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	
5.2.2.23.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	
5.2.2.23.04	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi/Sistem Informasi	
5.2.2.24	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
5.2.2.24.01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	
5.2.2.24.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	
5.2.2.24.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	
5.2.2.24.04	Belanja beasiswa tugas belajar S3	
5.2.2.24.05	Belanja Beasiswa Izin Belajar Bagi PNS	
5.2.2.25	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
5.2.2.25.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	
5.2.2.25.02	Belanja Sosialisasi	
5.2.2.25.03	Belanja Kepesertaan	
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	
5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	
5.2.2.27	Belanja Hibah Barang dan Jasa	
5.2.2.27.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	
5.2.2.27.02	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	
5.2.2.28.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
5.2.2.28.02	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	
5.2.2.29	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	
5.2.2.29.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	
5.2.2.30	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli	
5.2.2.30.01	Honorarium narasumber/tenaga ahli	

1	2	3
5.2.2.30.02	Akomodasi narasumber/tenaga ahli	
5.2.2.30.03	Transport narasumber/tenaga ahli	
5.2.2.31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	
5.2.2.31.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	
5.2.2.31.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	
5.2.2.32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	
5.2.2.32.01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer)	
5.2.2.32.02	Belanja Jasa Pendukung Acara	
5.2.2.33	Belanja Beasiswa Pendidikan	
5.2.2.33.01	Bantuan Praja IPDN	
5.2.2.34	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5.2.2.34.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	
5.2.2.34.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	
5.2.2.35	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
5.2.2.35.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	
5.2.2.35.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	
5.2.2.36	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	
5.2.2.36.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	
5.2.2.37	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	
5.2.2.37.01	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	
5.2.2.38	Belanja Jasa Kontribusi Kepesertaan	
5.2.2.38.01	Belanja Jasa Kontribusi Kepesertaan	
5.2.2.39	Belanja Jasa Listrik Untuk Fasilitas Umum	
5.2.2.39.01	Belanja Jasa Listrik Penerangan Jalan Umum	
5.2.2.40	Belanja Barang Dan Jasa BOP PAUD Negeri	
5.2.2.40.01	Belanja Barang Dan Jasa BOP PAUD Negeri	
5.2.3	Belanja Modal	
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
5.2.3.01.01	Belanja modal pengadaan tanah kantor	
5.2.3.01.02	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit	
5.2.3.01.03	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	
5.2.3.01.04	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik	
5.2.3.01.05	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak	
5.2.3.01.06	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar	
5.2.3.01.07	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	
5.2.3.01.08	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	
5.2.3.01.09	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus	
5.2.3.01.10	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus	
5.2.3.01.11	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan	
5.2.3.01.12	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti jompo	
5.2.3.01.13	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum terminal	
5.2.3.01.14	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum dermaga	
5.2.3.01.15	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis	
5.2.3.01.16	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan	
5.2.3.01.17	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan	
5.2.3.01.18	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar	
5.2.3.01.19	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	
5.2.3.01.20	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum taman	
5.2.3.01.21	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat	
5.2.3.01.22	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum ibadah	
5.2.3.01.23	Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga	
5.2.3.01.24	Belanja modal pengadaan tanah perumahan	
5.2.3.01.25	Belanja modal pengadaan tanah pertanian	
5.2.3.01.26	Belanja modal pengadaan tanah perkebunan	
5.2.3.01.27	Belanja modal pengadaan tanah perikanan	
5.2.3.01.28	Belanja modal pengadaan tanah peternakan	
5.2.3.01.29	Belanja modal pengadaan tanah perkampungan	

1	2	3
5.2.3.01.30	Belanja modal pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku	
5.2.3.01.31	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum Jalan	
5.2.3.01.32	Belanja modal pengadaan tanah kawasan industri	
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
5.2.3.02.01	Belanja modal pengadaan traktor	
5.2.3.02.02	Belanja modal pengadaan buldozer	
5.2.3.02.03	Belanja modal pengadaan stoom wals	
5.2.3.02.04	Belanja modal pengadaan eskavator	
5.2.3.02.05	Belanja modal pengadaan dump truk	
5.2.3.02.06	Belanja modal pengadaan crane	
5.2.3.02.07	Belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan	
5.2.3.02.08	Belanja modal pengadaan mesin pengolah semen	
5.2.3.02.09	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih	
5.2.3.02.10	Belanja modal pengadaan mesin pengolah aspal	
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
5.2.3.03.01	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	
5.2.3.03.02	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	
5.2.3.03.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	
5.2.3.03.04	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	
5.2.3.03.05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	
5.2.3.03.06	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	
5.2.3.03.07	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)	
5.2.3.03.08	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	
5.2.3.03.09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	
5.2.3.03.10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	
5.2.3.03.11	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	
5.2.3.03.12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	
5.2.3.03.13	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	
5.2.3.03.14	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan	
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
5.2.3.04.01	Belanja modal pengadaan gerobak	
5.2.3.04.02	Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong	
5.2.3.04.03	Belanja modal pengadaan becak	
5.2.3.04.04	Belanja modal pengadaan sepeda	
5.2.3.04.05	Belanja modal pengadaan karavan	
5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
5.2.3.05.01	Belanja modal pengadaan kapal motor	
5.2.3.05.02	Belanja modal pengadaan kapal feri	
5.2.3.05.03	Belanja modal pengadaan speed boat	
5.2.3.05.04	Belanja modal pengadaan motor boat/motor tempel	
5.2.3.05.05	Belanja modal pengadaan hydro foil	
5.2.3.05.06	Belanja modal pengadaan jet foil	
5.2.3.05.07	Belanja modal pengadaan kapai tug boat	
5.2.3.05.08	Belanja modal pengadaan kapal tanker	
5.2.3.05.09	Belanja modal pengadaan kapal kargo	
5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
5.2.3.06.01	Belanja modal pengadaan perahu layar	
5.2.3.06.02	Belanja modal pengadaan perahu sampan	
5.2.3.06.03	Belanja modal pengadaan perahu tongkang	
5.2.3.06.04	Belanja modal pengadaan perahu karet	
5.2.3.06.05	Belanja modal pengadaan perahu rakit	
5.2.3.06.06	Belanja modal pengadaan perahu sekoci	
5.2.3.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
5.2.3.07.01	Belanja modal pengadaan pesawat kargo	
5.2.3.07.02	Belanja modal pengadaan pesawat penumpang	
5.2.3.07.03	Belanja modal pengadaan pesawat helikopter	
5.2.3.07.04	Belanja modal pengadaan pesawat pemadam kebakaran	
5.2.3.07.05	Belanja modal pengadaan pesawat capung	
5.2.3.07.06	Belanja modal pengadaan pesawat terbang ampibi	
5.2.3.07.07	Belanja modal pengadaan pesawat terbang layang	
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
5.2.3.08.01	Belanja modal pengadaan mesin las	

1	2	3
5.2.3.08.02	Belanja modal pengadaan mesin bubut	
5.2.3.08.03	Belanja modal pengadaan mesin dongkrak	
5.2.3.08.04	Belanja modal pengadaan mesin kompresor	
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras	
5.2.3.08.06	Belanja modal pengadaan Dinamo	
5.2.3.08.07	Belanja modal pengadaan mesin packaging	
5.2.3.08.08	Belanja modal pengadaan generator	
5.2.3.08.09	Belanja modal pengadaan peralatan pertukangan	
5.2.3.08.10	Belanja modal pengadaan peralatan kelistrikan	
5.2.3.08.11	Belanja modal pengadaan peralatan teknisi elektronika	
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	
5.2.3.09.01	Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian	
5.2.3.09.02	Belanja modal pengadaan alat pengering gabah	
5.2.3.09.03	Belanja modal pengadaan mesin bajak	
5.2.3.09.04	Belanja modal pengadaan alat penetas	
5.2.3.09.05	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman	
5.2.3.09.06	Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan ternak	
5.2.3.09.07	Belanja modal pengadaan peralatan RPH/RPU	
5.2.3.09.08	Belanja modal pengadaan alat inseminasi buatan	
5.2.3.09.09	Belanja modal pengadaan karamba	
5.2.3.09.10	Belanja modal pengadaan jaring, pukut dan sejenisnya	
5.2.3.09.11	Belanja modal pengadaan kincir	
5.2.3.09.12	Belanja modal pengadaan mesin penyuling	
5.2.3.09.13	Belanja modal pengadaan mesin penggiling	
5.2.3.09.14	Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan	
5.2.3.09.15	Belanja modal pengadaan mesin pengurai hasil pertanian	
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
5.2.3.10.01	Belanja modal pengadaan mesin tik	
5.2.3.10.02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	
5.2.3.10.03	Belanja modal pengadaan mesin stensil	
5.2.3.10.04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	
5.2.3.10.05	Belanja modal pengadaan mesin cetak	
5.2.3.10.06	Belanja modal pengadaan mesin jilid	
5.2.3.10.07	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas	
5.2.3.10.08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	
5.2.3.10.09	Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik	
5.2.3.10.10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	
5.2.3.10.11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan peralatan audio visual	
5.2.3.10.13	Belanja modal pengadaan alat pompa	
5.2.3.10.14	Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)	
5.2.3.10.15	Belanja modal pengadaan genset	
5.2.3.10.16	Belanja modal pengadaan peralatan laundry	
5.2.3.10.17	Belanja modal pengadaan Trafo	
5.2.3.10.18	Belanja modal pengadaan mesin laminating	
5.2.3.10.19	Belanja modal pengadaan mesin fogging	
5.2.3.10.20	Belanja modal pengadaan spraycan dan hand sprayer (alat penyemprot)	
5.2.3.10.21	Belanja modal pengadaan peralatan Packaging	
5.2.3.10.22	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman	
5.2.3.10.23	Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya	
5.2.3.10.24	Belanja modal pengadaan alat musik	
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	
5.2.3.11.01	Belanja modal pengadaan meja gambar	
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	
5.2.3.11.03	Belanja modal pengadaan brankas	
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	
5.2.3.11.05	Belanja modal pengadaan white board	
5.2.3.11.06	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu	
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan penyekat ruangan	
5.2.3.11.10	Belanja modal pengadaan kipas angin	
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	
5.2.3.12.01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	
5.2.3.12.05	Belanja modal pengadaan scanner	
5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor/display	
5.2.3.12.07	Belanja modal pengadaan CPU	

1	2	3
5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk, speaker)	
5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	
5.2.3.12.11	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer	
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	
5.2.3.13.02	Belanja modal pengadaan meja rapat	
5.2.3.13.03	Belanja modal pengadaan meja makan	
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	
5.2.3.13.06	Belanja modal pengadaan kursi makan	
5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	
5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan perabot ruangan (rak buku / rak tv)	
5.2.3.13.10	Belanja modal pengadaan filling cabinet dan lemari besi	
5.2.3.13.11	Belanja modal pengadaan perabot penghias ruangan (vas bunga dll)	
5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Sekolah	
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	
5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan tabung gas	
5.2.3.14.02	Belanja modal pengadaan kompor gas	
5.2.3.14.03	Belanja modal pengadaan lemari makan	
5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser	
5.2.3.14.05	Belanja modal pengadaan kulkas	
5.2.3.14.06	Belanja modal pengadaan rak piring	
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan peralatan makan (piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau)	
5.2.3.14.08	Belanja modal pengadaan tungku besi	
5.2.3.14.09	Belanja modal pengadaan peralatan masak (dandang / wajan / kuai dan sejenisnya)	
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
5.2.3.15.01	Belanja modal pengadaan lampu hias	
5.2.3.15.02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya	
5.2.3.15.04	Belanja modal pengadaan karpet	
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	
5.2.3.16.02	Belanja modal pengadaan handycam	
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	
5.2.3.16.04	Belanja modal pengadaan peralatan Audio	
5.2.3.16.05	Belanja Modal pengadaan Peralatan Pemancar Radio dan Televisi	
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
5.2.3.17.01	Belanja modal pengadaan telepon	
5.2.3.17.02	Belanja modal pengadaan faximili	
5.2.3.17.03	Belanja modal pengadaan radio SSB	
5.2.3.17.04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	
5.2.3.17.05	Belanja modal pengadaan radio VHF	
5.2.3.17.06	Belanja modal pengadaan radio UHF	
5.2.3.17.07	Belanja modal pengadaan alat sandi	
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	
5.2.3.18.01	Belanja modal pengadaan timbangan	
5.2.3.18.02	Belanja modal pengadaan teodolite	
5.2.3.18.03	Belanja modal pengadaan alat uji emisi	
5.2.3.18.04	Belanja modal pengadaan alat GPS	
5.2.3.18.05	Belanja modal pengadaan kompas/peralatan navigasi	
5.2.3.18.06	Belanja modal pengadaan barometer	
5.2.3.18.07	Belanja modal pengadaan seismograph	
5.2.3.18.08	Belanja modal pengadaan ultrasonograph	
5.2.3.18.09	Belanja modal pengadaan alat Automatic Water Level Recording (AWLR)	
5.2.3.18.10	Belanja modal pengadaan alat ARR	
5.2.3.18.11	Belanja modal pengadaan alat ukur panjang	
5.2.3.18.12	Belanja modal pengadaan bejana ukur	
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	
5.2.3.19.01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	
5.2.3.19.02	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi	

1	2	3
5.2.3.19.03	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran THT	
5.2.3.19.04	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata	
5.2.3.19.05	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah	
5.2.3.19.06	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak	
5.2.3.19.07	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	
5.2.3.19.08	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin	
5.2.3.19.09	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi	
5.2.3.19.10	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran neurologi	
5.2.3.19.11	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi	
5.2.3.19.12	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan	
5.2.3.19.13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	
5.2.3.19.14	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran penyakit dalam/internis	
5.2.3.19.15	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rawat darurat	
5.2.3.19.16	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiologi	
5.2.3.19.17	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiotherapi	
5.2.3.19.18	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anasthesi	
5.2.3.19.19	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran forensik	
5.2.3.19.20	Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan gizi	
5.2.3.19.21	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rehabilitasi medik	
5.2.3.19.22	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran prostodentie	
5.2.3.19.23	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthodontie	
5.2.3.19.24	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi klinik	
5.2.3.19.25	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi anatomi	
5.2.3.19.26	Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis	
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	
5.2.3.20.01	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi	
5.2.3.20.02	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	
5.2.3.20.03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	
5.2.3.20.04	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian	
5.2.3.20.05	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	
5.2.3.20.06	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan	
5.2.3.20.07	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	
5.2.3.20.08	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	
5.2.3.20.09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	
5.2.3.21.02	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over	
5.2.3.21.03	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan under pass	
5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Landasan Pesawat Udara	
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
5.2.3.22.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung	
5.2.3.22.02	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton	
5.2.3.22.03	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	
5.2.3.22.04	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	
5.2.3.22.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan timbang	
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	
5.2.3.23.01	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan	
5.2.3.23.02	Belanja modal pengadaan konstruksi waduk	
5.2.3.23.03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	
5.2.3.23.04	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal bawah tanah	
5.2.3.23.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	
5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	
5.2.3.23.07	Belanja modal pengadaan konstruksi reservoir	
5.2.3.23.08	Belanja modal pengadaan konstruksi pintu air	
5.2.3.23.09	Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai	
5.2.3.23.10	Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai	
5.2.3.23.11	Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan penataan kawasan danau	
5.2.3.23.12	Belanja modal pengadaan konstruksi air bawah tanah	
5.2.3.23.13	Belanja modal pengadaan konstruksi sumur dan pengeboran	
5.2.3.23.14	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	
5.2.3.23.15	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan kolam dan sejenisnya	
5.2.3.23.16	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pabrik dan sejenisnya	
5.2.3.23.17	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan balai	
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
5.2.3.24.01	Belanja modal pengadaan lampu hias jalan	
5.2.3.24.02	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	

1	2	3
5.2.3.24.03	Belanja modal pengadaan lampu penerang hutan kota	
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	
5.2.3.25.02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	
5.2.3.25.03	Belanja modal pengadaan peralatan pembangkit listrik	
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	
5.2.3.26.02	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	
5.2.3.26.03	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	
5.2.3.26.04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	
5.2.3.26.05	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah	
5.2.3.26.06	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	
5.2.3.26.07	Belanja modal pengadaan konstruksi tugu peringatan	
5.2.3.26.08	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik	
5.2.3.26.09	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum	
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kesenian	
5.2.3.26.11	Belanja modal pengadaan Jerjak	
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
5.2.3.27.01	Belanja modal pengadaan buku matematika	
5.2.3.27.02	Belanja modal pengadaan buku fisika	
5.2.3.27.03	Belanja modal pengadaan buku kimia	
5.2.3.27.04	Belanja modal pengadaan buku biologi	
5.2.3.27.05	Belanja modal pengadaan buku biografi	
5.2.3.27.06	Belanja modal pengadaan buku geografi	
5.2.3.27.07	Belanja modal pengadaan buku astronomi	
5.2.3.27.08	Belanja modal pengadaan buku arkeologi	
5.2.3.27.09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	
5.2.3.27.10	Belanja modal pengadaan buku keagamaan	
5.2.3.27.11	Belanja modal pengadaan buku sejarah	
5.2.3.27.12	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya	
5.2.3.27.13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	
5.2.3.27.14	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	
5.2.3.27.15	Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	
5.2.3.27.16	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	
5.2.3.27.17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia	
5.2.3.27.18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	
5.2.3.27.19	Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan	
5.2.3.27.20	Belanja modal pengadaan buku industri dan perdagangan	
5.2.3.27.21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	
5.2.3.27.22	Belanja modal pengadaan buku naskah	
5.2.3.27.23	Belanja modal pengadaan terbitan berkala (jurnal, compact disk)	
5.2.3.27.24	Belanja modal pengadaan mikrofilm	
5.2.3.27.25	Belanja modal pengadaan peta / atlas / globe	
5.2.3.27.26	Belanja modal pengadaan buku pertanian	
5.2.3.27.27	Belanja modal pengadaan buku Bahasa Inggris	
5.2.3.27.28	Belanja modal pengadaan buku Karya Umum	
5.2.3.27.29	Belanja modal pengadaan buku filsafat	
5.2.3.27.30	Belanja modal pengadaan buku ilmu sosial	
5.2.3.27.31	Belanja modal pengadaan buku ilmu murni	
5.2.3.27.32	Belanja modal pengadaan buku terapan	
5.2.3.27.33	Belanja modal pengadaan buku kesenian dan olahraga	
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	
5.2.3.28.01	Belanja modal pengadaan lukisan / foto	
5.2.3.28.02	Belanja modal pengadaan patung	
5.2.3.28.03	Belanja modal pengadaan ukiran	
5.2.3.28.04	Belanja modal pengadaan pahatan	
5.2.3.28.05	Belanja modal pengadaan batu alam	
5.2.3.28.06	Belanja modal pengadaan maket / miniatur / diorama	
5.2.3.28.07	Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus	
5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
5.2.3.29.01	Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang	
5.2.3.29.02	Belanja modal pengadaan ternak	
5.2.3.29.03	Belanja modal pengadaan tanaman	
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
5.2.3.30.01	Belanja modal pengadaan senjata api	
5.2.3.30.02	Belanja modal pengadaan radar	

1	2	3
5.2.3.30.03	Belanja modal pengadaan mobil water canon	
5.2.3.30.04	Belanja modal pengadaan borgol	
5.2.3.30.05	Belanja modal pengadaan sangkur/bayonet	
5.2.3.30.06	Belanja modal pengadaan perisai/tameng	
5.2.3.30.07	Belanja modal pengadaan detektor logam	
5.2.3.30.08	Belanja modal pengadaan rompi anti peluru	
5.2.3.30.09	Belanja modal pengadaan pentungan	
5.2.3.30.10	Belanja modal pengadaan helm	
5.2.3.30.11	Belanja modal pengadaan alarm/sirene	
5.2.3.30.12	Belanja modal pengadaan sentolop/senter	
5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang / Papan Petunjuk	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Pengadaan rambu / plang petunjuk jalan	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	
5.2.3.31.03	Belanja Modal Pengadaan rambu / plang petunjuk pariwisata	
5.2.3.32	Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga	
5.2.3.32.01	Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga	
5.2.3.33	Belanja Modal Dana BOS	
5.2.3.33.01	Belanja Modal Dana BOS	
5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	
5.2.3.35	Belanja Modal BLUD Puskesmas	
5.2.3.35.01	Belanja Modal BLUD Puskesmas	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
6.1.1.01	Pelampauan penerimaan PAD	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang sah	
6.1.1.02	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak	
6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
6.1.1.02.03	Dana Alokasi Umum (DAU)	
6.1.1.02.04	Dana Alokasi Khusus (DAK)	
6.1.1.02.05	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	
6.1.1.02.06	Dana Penyesuaian	
6.1.1.03	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
6.1.1.03.01	Lain-lain Pendapatan yang sah	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung	
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai dari Belanja langsung	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	
6.1.1.04.05	Belanja Bunga	
6.1.1.04.06	Belanja Subsidi	
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	
6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil	
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	
6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	
6.1.1.04.12	Penghematan lainnya	
6.1.1.05	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	
6.1.1.05.01	Uang jaminan	
6.1.1.05.02	Potongan Taspen	
6.1.1.05.03	Potongan Beras	
6.1.1.05.04	Askes	
6.1.1.05.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Lainnya	

1	2	3
6.1.1.06	Kegiatan lanjutan	
6.1.1.06.01	Kegiatan lanjutan	
6.1.1.07	Pelampauan penerimaan pembiayaan	
6.1.1.07.01	Pelampauan penerimaan pembiayaan	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan nomor	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.3.01	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD	
6.1.3.01.01	BUMD	
6.1.3.02	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
6.1.3.02.01	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.1.4.01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	
6.1.4.01.01	Penerusan pinjaman	
6.1.4.02	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	
6.1.4.02.01	Pemerintah daerah	
6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	
6.1.4.03.01	Bank	
6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
6.1.4.04.01	Lembaga keuangan bukan bank	
6.1.4.05	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah	
6.1.4.05.01	Obligasi atas nama	
6.1.4.05.02	Obligasi nomor	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	
6.1.6.01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	
6.1.6.01.01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah	
6.1.6.01.02	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah	
6.1.6.01.03	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah	
6.1.6.02	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.1.6.02.01	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.1.6.03	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	
6.1.6.03.01	Pemerintah daerah	
6.1.6.04	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank	
6.1.6.04.01	Bank	
6.1.6.05	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
6.1.6.05.01	Lembaga keuangan bukan bank	
6.1.7	Pengembalian Penyertaan Modal	
6.1.7.01	Pengembalian penyertaan modal pemda	
6.1.7.01.01	Pengembalian penyertaan modal pemda dari BUMD	
6.1.7.01.02	Pengembalian penyertaan modal pemda dari Bank	
6.1.8	Penerimaan Aset Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.8.01	Penerimaan Nilai Aset Kekayaan daerah yang Dipisahkan	
6.1.8.01.01	Penerimaan Nilai Aset Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	

1	2	3
6.1.9	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
6.1.9.1	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
6.1.9.1.1	Penerimaan Kembali Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan nomor	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
6.2.2.01	Badan usaha milik pemerintah (BUMN)	
6.2.2.01.01	BUMN	
6.2.2.02	Badan usaha milik daerah (BUMD)	
6.2.2.02.01	PT Permodalan Siak (PERSI)	
6.2.2.02.02	PT Siak Pertambangan Energi (SPE)	
6.2.2.02.03	PT Kawasan Industri Buton (KIB)	
6.2.2.02.04	PT Bank Riau Kepri	
6.2.2.02.05	PT. Sarana Pembangunan Siak	
6.2.2.03	Badan usaha milik swasta	
6.2.2.03.01	Badan	
6.2.2.04	Dana Bergulir	
6.2.2.04.1	Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah	
6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	
6.2.3.01.01	Penerusan pinjaman	
6.2.3.02	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain	
6.2.3.02.01	Pemerintah daerah	
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank	
6.2.3.03.01	Bank	
6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.04.01	Lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.05	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah	
6.2.3.05.01	Penerusan pinjaman	
6.2.3.06	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada pemerintah daerah lain	
6.2.3.06.01	Pemerintah daerah	

1	2	3
6.2.3.07	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank	
6.2.3.07.01	Bank	
6.2.3.08	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.08.01	Lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.09	Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo	
6.2.3.09.01	Obligasi atas nama	
6.2.3.09.02	Obligasi nomor	
6.2.3.10	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo	
6.2.3.10.01	Obligasi atas nama	
6.2.3.10.02	Obligasi nomor	
6.2.3.11	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	
6.2.3.11.01	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.4.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah	
6.2.4.01.01	Pemerintah	
6.2.4.02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada pemerintah daerah lain	
6.2.4.02.01	Pemerintah daerah	
6.2.5	Pembayaran Kewajiban pada Pihak Ketiga	
6.2.5.01	Pembayaran Kewajiban pada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	
6.2.5.01.01	Pembayaran Kewajiban pada Pihak Ketiga Lainnya	
6.2.6	Pengembalian Penerimaan Daerah	
6.2.6.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana PAD	
6.2.6.01.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana PAD	
6.2.6.01.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dana PAD Lainnya	
6.2.6.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Perimbangan	
6.2.6.02.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana DAK	
6.2.6.02.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana DAU	
6.2.6.03	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
6.2.6.03.01	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Penyesuaian	
6.2.6.03.02	Pengembalian Penerimaan Daerah Dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	


 BUPATI SIAK,
 ALFEDRI

**DAFTAR KODE AKUN NERACA
 KABUPATEN SIAK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1.1	ASET LANCAR	
1.1.1	Kas	
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	
1.1.1.01.01	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1.01.02	Bagi Hasil/SILPA	
1.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1.1.1.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1.1.1.01.05	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	
1.1.1.01.06	Dana Alokasi Umum	
1.1.1.01.07	Dana Alokasi Khusus (DAK)	
1.1.1.01.08	Pendapatan Hibah	
1.1.1.01.09	Dana Darurat	
1.1.1.01.10	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1.1.1.01.11	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1.1.1.01.12	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1.1.1.01.13	DAK Bid. Infrastruktur	
1.1.1.01.14	DAK Bid. Pertanian	
1.1.1.01.15	DAK Bid. Kesehatan	
1.1.1.01.16	DAK Bid. Pendidikan	
1.1.1.01.17	DAK Bid. Kelautan dan Perikanan	
1.1.1.01.18	DAK Bid. Prasarana Pemda	
1.1.1.01.19	DAK Bid. Lingkungan Hidup	
1.1.1.01.20	Kas Umum Daerah	
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	
1.1.1.03.01	Kas Pada Bendahara	
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	
1.1.2.01	Investasi dalam Saham	
1.1.2.01.01	Investasi dalam Saham	
1.1.2.02	Investasi dalam Obligasi	
1.1.2.02.01	Investasi dalam Obligasi	
1.1.3	Piutang	
1.1.3.01	Piutang Pajak	
1.1.3.01.01	Piutang Pajak	
1.1.3.02	Piutang Retribusi	
1.1.3.02.01	Piutang Retribusi	
1.1.3.03	Piutang Dana Bagi Hasil	
1.1.3.03.01	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	
1.1.3.03.02	Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	
1.1.3.04	Piutang Dana Alokasi Umum	
1.1.3.04.01	Piutang Dana Alokasi Umum	
1.1.3.05	Piutang Dana Alokasi Khusus	
1.1.3.05.01	Piutang Dana Alokasi Khusus	

1.1.4	Piutang Lain-lain	
1.1.4.01	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran	
1.1.4.01.01	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	
1.1.4.01.02	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	
1.1.4.02	Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	
1.1.4.02.01	Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	
1.1.4.03	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	
1.1.4.03.01	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	
1.1.4.04	Piutang Dividen	
1.1.4.04.01	Piutang Dividen	
1.1.4.05	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	
1.1.4.05.01	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	
1.1.4.06	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.1.4.06.01	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.1.5	Persediaan	
1.1.5.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.5.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	
1.1.5.02	Persediaan Alat Listrik	
1.1.5.02.01	Persediaan Alat Tulis Listrik	
1.1.5.03	Persediaan Material/Bahan	
1.1.5.03.01	Persediaan Bahan Baku Bangunan	
1.1.5.03.02	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	
1.1.5.03.03	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	
1.1.5.03.04	Persediaan Bibit Ternak	
1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan	
1.1.5.03.06	Persediaan Bahan Kimia	
1.1.5.04	Persediaan Benda Pos	
1.1.5.04.01	Persediaan Perangko	
1.1.5.04.02	Persediaan Materai	
1.1.5.04.03	Persediaan Kertas Segel	
1.1.5.05	Persediaan Bahan Bakar	
1.1.5.05.01	Persediaan Bahan Bakar minyak	
1.1.5.06	Persediaan Bahan Makanan Pokok	
1.1.5.06.01	Persediaan Bahan Makanan Pokok	
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	
1.2.1	Investasi Non Permanen	
1.2.1.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	
1.2.1.01.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	
1.2.1.02	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
1.2.1.02.01	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
1.2.1.03	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.2.1.03.01	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.2.1.04	Investasi dalam Surat Utang Negara	
1.2.1.04.01	Investasi dalam Surat Utang Negara	
1.2.1.05	Investasi Non Permanen Lainnya	
1.2.1.05.01	Investasi Non Permanen Lainnya	
1.2.2	Investasi Permanen	

1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
1.2.2.02	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	
1.2.2.02.01	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	
1.2.2.03	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	
1.2.2.03.01	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	
1.2.2.04	Investasi Permanen Lainnya	
1.2.2.04.01	Investasi Permanen Lainnya	
1.3	ASET TETAP	
1.3.1	Tanah	
1.3.1.01	Tanah Kantor	
1.3.1.01.01	Tanah Kantor	
1.3.1.02	Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	
1.3.1.02.01	Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	
1.3.1.03	Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas	
1.3.1.03.01	Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas	
1.3.1.04	Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik	
1.3.1.04.01	Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik	
1.3.1.05	Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak	
1.3.1.05.01	Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak	
1.3.1.06	Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar	
1.3.1.06.01	Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar	
1.3.1.07	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan	
1.3.1.07.01	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan	
1.3.1.08	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan	
1.3.1.08.01	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan	
1.3.1.09	Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus	
1.3.1.09.01	Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa	
1.3.1.09.02	Tanah Sarana Pendidikan Luar Khusus	
1.3.1.10	Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus	
1.3.1.10.01	Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan	
1.3.1.10.02	Tanah Sarana Pendidikan Kursus	
1.3.1.11	Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan	
1.3.1.11.01	Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan	
1.3.1.12	Tanah Sarana Sosial Panti Jompo	
1.3.1.12.01	Tanah Sarana Sosial Panti Jompo	
1.3.1.13	Tanah Sarana Umum Terminal	
1.3.1.13.01	Tanah Sarana Umum Terminal	
1.3.1.14	Tanah Sarana Umum Dermaga	
1.3.1.14.01	Tanah Sarana Umum Dermaga	
1.3.1.15	Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis	
1.3.1.15.01	Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis	
1.3.1.16	Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan	
1.3.1.16.01	Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan	
1.3.1.17	Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan	
1.3.1.17.01	Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan	

1.3.1.18	Tanah Sarana Umum Pasar	
1.3.1.18.01	Tanah Sarana Umum Pasar	
1.3.1.19	Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	
1.3.1.19.01	Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	
1.3.1.20	Tanah Sarana Umum Taman	
1.3.1.20.01	Tanah Sarana Umum Taman	
1.3.1.21	Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat	
1.3.1.21.01	Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat	
1.3.1.22	Tanah Sarana Umum Ibadah	
1.3.1.22.01	Tanah Sarana Umum Ibadah	
1.3.1.23	Tanah Sarana Stadion Olahraga	
1.3.1.23.01	Tanah Sarana Umum Olahraga	
1.3.1.24	Tanah Perumahan	
1.3.1.24.01	Tanah Perumahan	
1.3.1.25	Tanah Pertanian	
1.3.1.25.01	Tanah Pertanian	
1.3.1.26	Tanah Perkebunan	
1.3.1.26.01	Tanah Perkebunan	
1.3.1.27	Tanah Perikanan	
1.3.1.27.01	Tanah Perikanan	
1.3.1.28	Tanah Peternakan	
1.3.1.28.01	Tanah Peternakan	
1.3.1.29	Tanah Perkampungan	
1.3.1.29.01	Tanah Perkampungan	
1.3.1.30	Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku	
1.3.1.30.01	Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat-alat Berat	
1.3.2.01.01	Traktor	
1.3.2.01.02	Buldozer	
1.3.2.01.03	Stoom Wals	
1.3.2.01.04	Eskavator	
1.3.2.01.05	Dump Truk	
1.3.2.01.06	Crane	
1.3.2.01.07	Kendaraan penyapu jalan	
1.3.2.01.08	Mesin pengolah semen	
1.3.2.01.09	Mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)	
1.3.2.02	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.2.02.01	Alat-alat angkutan darat bermotor sedan	
1.3.2.02.02	Alat-alat angkutan darat bermotor jeep	
1.3.2.02.03	Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	
1.3.2.02.04	Alat-alat angkutan darat bermotor bus	
1.3.2.02.05	Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	
1.3.2.02.06	Alat-alat angkutan darat bermotor truck	
1.3.2.02.07	Alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)	
1.3.2.02.08	Alat-alat angkutan darat bermotor boks	
1.3.2.02.09	Alat-alat angkutan darat bermotor pick up	
1.3.2.02.10	Alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	
1.3.2.02.11	Alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	
1.3.2.02.12	Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	
1.3.2.02.13	Alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	
1.3.2.02.14	Alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan	

1.3.2.03	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
1.3.2.03.01	Gerobak	
1.3.2.03.02	Pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong	
1.3.2.03.03	Becak	
1.3.2.03.04	Sepeda	
1.3.2.03.05	Karavan	
1.3.2.04	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
1.3.2.04.01	Kapal motor	
1.3.2.04.02	Kapal feri	
1.3.2.04.03	Speed boat	
1.3.2.04.04	Motor boat/motor tempel	
1.3.2.04.05	Hydro foil	
1.3.2.04.06	Jet foil	
1.3.2.04.07	Kapal tug boat	
1.3.2.04.08	Kapal tanker	
1.3.2.04.09	Kapal kargo	
1.3.2.05	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
1.3.2.05.01	Perahu layar	
1.3.2.05.02	Perahu sampan	
1.3.2.05.03	Perahu tongkang	
1.3.2.05.04	Perahu karet	
1.3.2.05.05	Perahu rakit	
1.3.2.05.06	Perahu sekoci	
1.3.2.06	Alat-alat Angkutan Udara	
1.3.2.06.01	Pesawat kargo	
1.3.2.06.02	Pesawat penumpang	
1.3.2.06.03	Pesawat helikopter	
1.3.2.06.04	Pesawat pemadam kebakaran	
1.3.2.06.05	Pesawat capung	
1.3.2.06.06	Pesawat terbang amphi	
1.3.2.06.07	Pesawat terbang layang	
1.3.2.07	Alat-alat Bengkel	
1.3.2.07.01	Mesin las	
1.3.2.07.02	Mesin bubut	
1.3.2.07.03	Mesin dongkrak	
1.3.2.07.04	Mesin kompresor	
1.3.2.08	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	
1.3.2.08.01	Penggiling hasil pertanian	
1.3.2.08.02	Alat pengering gabah	
1.3.2.08.03	Mesin bajak	
1.3.2.08.04	Alat penetas	
1.3.2.09	Peralatan Kantor	
1.3.2.09.01	Mesin tik	
1.3.2.09.02	Mesin hitung	
1.3.2.09.03	Mesin stensil	
1.3.2.09.04	Mesin fotocopy	
1.3.2.09.05	Mesin cetak	
1.3.2.09.06	Mesin jilid	
1.3.2.09.07	Mesin potong kertas	
1.3.2.09.08	Mesin penghancur kertas	
1.3.2.09.09	Papan tulis elektronik	
1.3.2.09.10	Papan visual elektronik	
1.3.2.09.11	Tabung pemadam kebakaran	
1.3.2.10	Perlengkapan Kantor	
1.3.2.10.01	Meja gambar	
1.3.2.10.02	Almari	
1.3.2.10.03	Brankas	
1.3.2.10.04	Filling kabinet	
1.3.2.10.05	White board	
1.3.2.10.06	Penunjuk waktu	
1.3.2.11	Komputer	

1.3.2.11.01	Komputer mainframe/server	
1.3.2.11.02	Komputer/PC	
1.3.2.11.03	Komputer note book	
1.3.2.11.04	Printer	
1.3.2.11.05	Scanner	
1.3.2.11.06	Monitor/display	
1.3.2.11.07	CPU	
1.3.2.11.08	UPS/Stabilizer	
1.3.2.11.09	Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	
1.3.2.11.10	Peralatan jaringan komputer	
1.3.2.12	Meubelair	
1.3.2.12.01	Meja kerja	
1.3.2.12.02	Meja rapat	
1.3.2.12.03	Meja makan	
1.3.2.12.04	Kursi kerja	
1.3.2.12.05	Kursi rapat	
1.3.2.12.06	Kursi makan	
1.3.2.12.07	Tempat tidur	
1.3.2.12.08	Sofa	
1.3.2.12.09	Rak buku/tv/kembang	
1.3.2.13	Peralatan Dapur	
1.3.2.13.01	Tabung gas	
1.3.2.13.02	Kompor gas	
1.3.2.13.03	Lemari makan	
1.3.2.13.04	Dispenser	
1.3.2.13.05	Kulkas	
1.3.2.13.06	Rak piring	
1.3.2.13.07	Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	
1.3.2.14	Penghias Ruangan Rumah Tangga	
1.3.2.14.01	Lampu hias	
1.3.2.14.02	Jam dinding/meja	
1.3.2.15	Alat-alat Studio	
1.3.2.15.01	Kamera	
1.3.2.15.02	Handycam	
1.3.2.15.03	Proyektor	
1.3.2.16	Alat-alat Komunikasi	
1.3.2.16.01	Telepon	
1.3.2.16.02	Faximili	
1.3.2.16.03	Radio ssb	
1.3.2.16.04	Radio HF/FM (handy talkie)	
1.3.2.16.05	Radio VHF	
1.3.2.16.06	Radio UHF	
1.3.2.16.07	Alat sandi	
1.3.2.17	Alat-alat Ukur	
1.3.2.17.01	Timbangan	
1.3.2.17.02	Teodolite	
1.3.2.17.03	Alat uji emisi	
1.3.2.17.04	Alat GPS	
1.3.2.17.05	Kompas/peralatan navigasi	
1.3.2.17.06	Bejana ukur	
1.3.2.17.07	Barometer	
1.3.2.17.08	Seismograph	
1.3.2.17.09	Ultrasonograph	
1.3.2.18	Alat-alat Kedokteran	
1.3.2.18.01	Alat-alat kedokteran umum	
1.3.2.18.02	Alat-alat kedokteran gigi	
1.3.2.18.03	Alat-alat kedokteran tht	
1.3.2.18.04	Alat-alat kedokteran mata	
1.3.2.18.05	Alat-alat kedokteran bedah	
1.3.2.18.06	Alat-alat kedokteran anak	
1.3.2.18.07	Alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	
1.3.2.18.08	Alat-alat kedokteran kulit dan kelamin	

1.3.2.18.09	Alat-alat kedokteran kardiologi	
1.3.2.18.10	Alat-alat kedokteran neurologi	
1.3.2.18.11	Alat-alat kedokteran orthopedi	
1.3.2.18.12	Alat-alat kedokteran hewan	
1.3.2.18.13	Alat-alat farmasi	
1.3.2.18.14	Alat-alat penyakit dalam/internis	
1.3.2.19	Alat-alat Laboratorium	
1.3.2.19.01	Alat-alat laboratorium biologi	
1.3.2.19.02	Alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	
1.3.2.19.03	Alat-alat laboratorium kimia	
1.3.2.19.04	Alat-alat laboratorium pertanian	
1.3.2.19.05	Alat-alat laboratorium peternakan	
1.3.2.19.06	Alat-alat laboratorium perkebunan	
1.3.2.19.07	Alat-alat laboratorium perikanan	
1.3.2.19.08	Alat-alat laboratorium bahasa	
1.3.2.19.09	Alat-alat peraga / praktik sekolah	
1.3.2.20	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
1.3.2.20.01	Senjata api	
1.3.2.20.02	Water canon	
1.3.2.20.03	Borgol	
1.3.2.20.04	Sangkur/bayonet	
1.3.2.20.05	Perisai/tameng	
1.3.2.20.06	Detektor logam	
1.3.2.20.07	Rompi anti peluru	
1.3.2.20.08	Pentungan	
1.3.2.20.09	Helm	
1.3.2.20.10	Alarm/sirene	
1.3.2.20.11	Sentolop/senter	
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Gedung Kantor	
1.3.3.01.01	Gedung kantor	
1.3.3.02	Gedung Rumah Jabatan	
1.3.3.02.01	Gedung rumah jabatan	
1.3.3.03	Gedung Rumah Dinas	
1.3.3.03.01	Gedung rumah dinas	
1.3.3.04	Gedung Gudang	
1.3.3.04.01	Gedung gudang	
1.3.3.05	Bangunan bersejarah	
1.3.3.05.01	Bangunan bersejarah	
1.3.3.06	Bangunan monumen	
1.3.3.06.01	Bangunan monumen	
1.3.3.07	Tugu peringatan	
1.3.3.07.01	Tugu peringatan	
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	
1.3.4.01	Jalan	
1.3.4.01.01	Jalan	
1.3.4.01.02	Jalan fly over	
1.3.4.01.03	Jalan under pass	
1.3.4.02	Jembatan	
1.3.4.02.01	Jembatan gantung	
1.3.4.02.02	Jembatan ponton	
1.3.4.02.03	Jembatan penyebrangan orang	
1.3.4.02.04	Jembatan penyebrangan diatas air	
1.3.4.03	Jaringan Air	
1.3.4.03.01	Jaringan irigasi/waduk/bendungan	

1.3.4.03.02	Jaringan air bersih/air minum	
1.3.4.03.03	Reservoir	
1.3.4.03.04	Pintu air	
1.3.4.04	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
1.3.4.04.01	Lampu hias jalan	
1.3.4.04.02	Lampu hias taman	
1.3.4.04.03	Lampu penerang hutan kota	
1.3.4.05	Instalasi Listrik dan Telepon	
1.3.4.05.01	Instalasi Listrik	
1.3.4.05.02	Jaringan Telepon	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
1.3.5.01	Buku dan Kepustakaan	
1.3.5.01.01	Buku matematika	
1.3.5.01.02	Buku fisika	
1.3.5.01.03	Buku kimia	
1.3.5.01.04	Buku biologi	
1.3.5.01.05	Buku biografi	
1.3.5.01.06	Buku geografi	
1.3.5.01.07	Buku astronomi	
1.3.5.01.08	Buku arkeologi	
1.3.5.01.09	Buku bahasa dan sastra	
1.3.5.01.10	Buku keagamaan	
1.3.5.01.11	Buku sejarah	
1.3.5.01.12	Buku seni dan budaya	
1.3.5.01.13	Buku ilmu pengetahuan umum	
1.3.5.01.14	Buku ilmu pengetahuan sosial	
1.3.5.01.15	Buku ilmu politik dan ketatanegaraan	
1.3.5.01.16	Buku ilmu pengetahuan dan teknologi	
1.3.5.01.17	Buku ensiklopedia	
1.3.5.01.18	Buku kamus bahasa	
1.3.5.01.19	Buku ekonomi dan keuangan	
1.3.5.01.20	Buku industri dan perdagangan	
1.3.5.01.21	Buku peraturan perundang-undangan	
1.3.5.01.22	Buku naskah	
1.3.5.01.23	Terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)	
1.3.5.01.24	Mikrofilm	
1.3.5.01.25	Peta/atlas/globe	
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
1.3.5.02.01	Lukisan/foto	
1.3.5.02.02	Patung	
1.3.5.02.03	Ukiran	
1.3.5.02.04	Pahatan	
1.3.5.02.05	Batu alam	
1.3.5.02.06	Maket/miniatur/diorama	
1.3.5.03	Hewan/Ternak dan Tanaman	
1.3.5.03.01	Hewan kebun binatang	
1.3.5.03.02	Ternak	
1.3.5.03.03	Tanaman	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
1.4	DANA CADANGAN	
1.4.1	Dana Cadangan	

1.4.1.01	Dana Cadangan	
1.4.1.01.01	Dana Cadangan	
1.5	ASET LAINNYA	
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	
1.5.1.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	
1.5.1.01.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	
1.5.1.02	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	
1.5.1.02.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah	
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah	
1.5.2.01	Tagihan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah	
1.5.2.01.01	Tagihan Tuntutan Ganti Keuangan Daerah	
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
1.5.3.01	Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	
1.5.3.01.01	Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	
1.5.3.02	Bangun serah guna(Build, Transfer and Operate/BTO)	
1.5.3.02.01	Bangun serah gunaBuild, Transfer and Operate/BTO)	
1.5.3.03	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.3.03.01	Kerjasama Operasi (KSO)	
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	
1.5.4.01	Aset Tidak Berwujud	
1.5.4.01.01	Aset Tidak Berwujud	
1.5.5	Aset Lain-lain	
1.5.5.01	Aset Lain-lain	
1.5.5.01.01	Aset Lain-lain	
16	RK SKPD	
1.6.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.6.1.01	Pendidikan	
1.6.1.01.01	RK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.6.1.02	Kesehatan	
1.6.1.02.01	RK Dinas Kesehatan	
1.6.1.02.02	RK Rumah Sakit Umum Daerah	
1.6.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.6.1.03.01	RK Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.6.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
1.6.1.05.01	RK Satuan Polisi Pamong Praja	
1.6.1.06	Sosial	
1.6.1.06.01	RK Dinas Sosial	
1.6.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.6.2.01	Tenaga Kerja	
1.6.2.01.01	RK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
1.6.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

1.6.2.02.01	RK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.6.2.03	Pangan	
1.6.2.03.01	RK Dinas Ketahanan Pangan	
1.6.2.05	Lingkungan Hidup	
1.6.2.05.01	RK Dinas Lingkungan Hidup	
1.6.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1.6.2.06.01	RK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1.6.2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
1.6.2.07.01	RK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
1.6.2.09	Perhubungan	
1.6.2.09.01	RK Dinas Perhubungan	
1.6.2.10	Komunikasi dan Informatika	
1.6.2.10.01	RK Dinas Komunikasi dan Informatika	
1.6.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1.6.2.11.01	RK Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
1.6.2.12	Penanaman Modal	
1.6.2.12.01	RK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.6.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	
1.6.2.13.01	RK Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
1.6.2.17	Perpustakaan	
1.6.2.17.01	RK Dinas Perpustakaan	
1.6.3	URUSAH PEMERINTAHAN PILIHAN	
1.6.3.05	Perdagangan	
1.6.3.05.01	RK Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
1.6.3.1	Kelautan dan Perikanan	
1.6.3.1.01	RK Dinas Perikanan dan Peternakan	
1.6.3.2	Pariwisata	
1.6.3.2.01	RK Dinas Pariwisata	
1.6.3.3	Pertanian	
1.6.3.3.01	RK Dinas Pertanian	
1.6.4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	
1.6.4.01	Perencanaan	
1.6.4.01.01	RK Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
1.6.4.02	Keuangan	
1.6.4.02.01	RK Badan Keuangan Daerah	
1.6.4.03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	
1.6.4.03.01	RK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1.6.4.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.6.4.05.01	RK Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.6.4.06	Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.6.4.06.01	RK Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.6.5	FUNGSI PENDUKUNG	
1.6.5.1	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	
1.6.5.1.01	RK Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	

1.6.5.2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1.6.5.2.01	RK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1.6.5.3	Sekretariat Daerah	
1.6.5.3.01	RK Sekretariat Daerah	
1.6.5.4	Sekretariat DPRD	
1.6.5.4.01	RK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1.6.5.5	Inspektorat	
1.6.5.5.01	RK Inspektorat	
1.6.5.6	Sekretariat KORPRI	
1.6.5.6.01	RK Sekretariat KORPRI	
1.6.5.7	Kecamatan	
1.6.5.7.01	RK Kecamatan Siak	
1.6.5.7.02	RK Kecamatan Sungai Apit	
1.6.5.7.03	RK Kecamatan Minas	
1.6.5.7.04	RK Kecamatan Tualang	
1.6.5.7.05	RK Kecamatan Dayun	
1.6.5.7.06	RK Kecamatan Kerinci Kanan	
1.6.5.7.07	RK Kecamatan Bunga Raya	
1.6.5.7.08	RK Kecamatan Sungai Mandau	
1.6.5.7.09	RK Kecamatan Kandis	
1.6.5.7.10	RK Kecamatan Koto Gasib	
1.6.5.7.11	RK Kecamatan Lubuk Dalam	
1.6.5.7.12	RK Kecamatan Sabak Auh	
1.6.5.7.13	RK Kecamatan Mempura	
1.6.5.7.14	RK Kecamatan Pusako	
1.6.1.21	KETAHANAN PANGAN	
1.6.1.21.01	RK Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	
1.6.1.24	KEARSIPAN	
1.6.1.24.01	RK Kantor Perpustakaan dan Arsip	
1.6.2	URUSAN PILIHAN	
1.6.2.01	PERTANIAN	
1.6.2.01.01	RK Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	
1.6.2.02	KEHUTANAN	
1.6.2.02.01	RK Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
2	KEWAJIBAN	
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	
2.1.1.01	Utang Taspen	
2.1.1.01.01	Utang Taspen	
2.1.1.02	Utang Askes	
2.1.1.02.01	Utang Askes	
2.1.1.03	Utang PPh Pusat	
2.1.1.03.01	Utang PPh Pusat	
2.1.1.04	Utang PPN Pusat	
2.1.1.04.01	Utang PPN Pusat	
2.1.1.05	Utang Taperum	
2.1.1.05.01	Utang Taperum	
2.1.1.06	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2.1.1.06.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	
2.1.1.06.02	Iuran Wajib Pegawai	

2.1.1.06.03	Tabungan Perumahan Pegawai	
2.1.1.06.05	Iuran Kesehatan	
2.1.1.06.06	Denda	
2.1.1.06.07	Iuran Astek	
2.1.1.06.08	PPh Pasal 4 Ayat 2	
2.1.1.06.09	Setoran Pajak Hotel dan Restoran	
2.1.1.06.10	Jaminan Kecelakaan Kerja	
2.1.1.06.11	Jaminan Kematian	
2.1.2	Utang Bunga	
2.1.2.01	Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat	
2.1.2.01.01	Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat	
2.1.2.02	Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya	
2.1.2.02.01	Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya	
2.1.2.03	Utang Bunga kepada BUMN/BUMD	
2.1.2.03.01	Utang Bunga kepada BUMN	
2.1.2.03.02	Utang Bunga kepada BUMD	
2.1.2.04	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan	
2.1.2.04.01	Utang Bunga kepada Bank	
2.1.2.04.02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan	
2.1.2.05	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2.1.2.05.01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya	
2.1.2.06	Utang Bunga Luar Negeri	
2.1.2.06.01	Utang Bunga Luar Negeri	
2.1.3	Utang Pajak	
2.1.3.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	
2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	
2.1.3.02	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	
2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	
2.1.3.03	Utang Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.03.01	Utang Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai	
2.1.3.04	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	
2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
2.1.4.01	Utang Bank	
2.1.4.01.01	Utang Bank	
2.1.4.02	Utang Obligasi	
2.1.4.02.01	Utang Obligasi	
2.1.4.03	Utang Pemerintah Pusat	
2.1.4.03.01	Utang Pemerintah Pusat	
2.1.4.04	Utang Pemerintah Provinsi	
2.1.4.04.01	Utang Pemerintah Provinsi	
2.1.4.05	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.1.4.05.01	Utang Pemerintah Kabupaten	
2.1.4.05.02	Utang Pemerintah Kota	
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	
2.1.5.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III	
2.1.5.01.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III	
2.1.5.02	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	

2.1.5.02.01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2.1.5.03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2.1.5.03.01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01	Utang Jangka Pendek Lainnya	
2.1.6.01.01	Utang Jangka Pendek Lainnya	
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
2.2.1	Utang Dalam Negeri	
2.2.1.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	
2.2.1.02	Utang Dalam Negeri - Obligasi	
2.2.1.02.01	Utang Dalam Negeri - Obligasi	
2.2.1.03	Utang Pemerintah Pusat	
2.2.1.03.01	Utang Pemerintah Pusat	
2.2.1.04	Utang Pemerintah Provinsi	
2.2.1.04.01	Utang Pemerintah Provinsi	
2.2.1.05	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.2.1.05.01	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.2.2	Utang Luar Negeri	
2.2.2.01	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan	
2.2.2.01.01	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan	
3	EKUITAS DANA	
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.2	Cadangan Piutang	
3.1.2.01	Cadangan Piutang	
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang	
3.1.3	Cadangan Persediaan	
3.1.3.01	Cadangan Persediaan	
3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan	
3.1.4	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	
3.1.4.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	
3.1.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	
3.2.1.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	
3.2.2.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	
3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	
3.2.3.01	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	
3.2.3.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	

1	2	2
3.2.4	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	
3.2.4.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	
3.2.4.01.01	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN	
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	
3.3.1.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	
3.4	RK PPKD	
3.4.1	RK PPKD	
3.4.1.01	RK PPKD	
3.4.1.01.01	RK PPKD	

BUPATI SIAK,

ALFEDRI